



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024-2026

TAHUN PENILAIAN 2025



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian kegiatan penyelenggaraan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal yang diselenggarakan secara menyeluruh bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata Kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, disusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yang memuat pengelolaan risiko beserta pengendalian atas risiko yang menghambat pencapaian tujuan Pemerintah

Kabupaten Banyumas.

Tujuan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam RPD Tahun 2024-2026 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah; Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan SDM; Memperkuat ketahanan pangan. Agar tujuan Pembangunan daerah kabupaten Banyumas tersebut dapat tercapai, dilakukan pengelolaan risiko termasuk di dalamnya penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko yang diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP Strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

C. Tujuan

Tujuan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) disusun untuk memberikan acuan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah keterjadian risiko dan mendukung pencapaian keberhasilan tujuan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

D. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- 2) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 3) Mengenali risiko yang menghambat pencapaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 dan merencanakan tindak pengendalian atas risiko yang tepat.

E. Ruang Lingkup

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini fokus pada identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, antara lain:

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Strategi
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing	1	Mewujudkan ASN professional	1	Meningkatkan kinerja dan kompetensi ASN
		2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	2	Mengoptimalkan kinerja pelayanan publik serta meningkatkan keterbukaan informasi publik
		3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif	3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Instansi Pemerintah yang berbasis pada Reformasi Birokrasi tematik dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	4	Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi daerah	4	Mengoptimalkan pengembangan produk potensi ekonomi daerah
		5	Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah	5	Mengoptimalkan pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
				6	Menurunkan potensi konflik politik serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat
		6	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah	7	Meningkatkan kualitas permukiman dan cakupan infrastruktur pelayanan dasar
				8	Merencanakan penataan kawasan strategis, pengembangan dan konektivitas wilayah untuk persiapan pemekaran wilayah
7	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan resiko bencana	9	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengoptimalkan pengelolaan risiko bencana serta penyelenggaraan penataan ruang		

No	Tujuan	No	Sasaran	No	Strategi
		8	Meningkatkan kapabilitas riset dan inovasi	10	Meningkatkan kualitas hasil riset serta pengembangan inovasi daerah yang tepat guna
3	Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	9	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	11	Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data terpadu kemiskinan untuk mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat miskin
				12	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat rentan miskin
				13	Meningkatkan layanan PPKS
		10	Meningkatkan Kesempatan kerja	14	Meningkatkan iklim investasi dan usaha
		11	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	15	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
		12	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	16	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan
		13	Meningkatkan derajat Pendidikan	17	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan
		14	Meningkatnya literasi masyarakat	18	Meningkatkan minat baca masyarakat melalui literasi digital
		15	Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan penduduk	19	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap keluarga berencana
		16	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	20	Meningkatkan pembangunan berbasis gender dan Anak
17	Meningkatkan kapabilitas dan daya saing pemuda	21	Meningkatkan peran aktif pemuda serta prestasi pemuda dan olahraga		
4.	Memperkuat ketahanan pangan	18	Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri.	22	Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan
		19	Meningkatkan keterjangkauan pangan	23	Meningkatkan keterjangkauan harga pangan, pemerataan distribusi pangan, serta mengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan
		20	Mengoptimalkan Pemanfaatan Pangan	24	Meningkatkan keamanan pangan serta mengoptimalkan pola konsumsi pangan ideal

Sumber: RPD Bappedalitbang, 2024

Dokumen RTP Strategis Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2024-2026 yang disusun ini merupakan hasil pengelolaan risiko yang telah dilakukan reviu terhadap dokumen RTP Tahun 2024-2026 awal (Periode penilaian RKPD tahun 2024), kemudian ditetapkan sebagai dokumen RTP Tahun 2024-2026 Reviu (Periode penilaian RKPD Tahun 2025). Dokumen RTP Strategis Pemkab Tahun 2024-2026 (periode penilaian tahun 2025) disusun dengan beberapa pertimbangan dalam perumusan/identifikasi risiko, antara lain:

1. Permasalahan pada dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang dimungkinkan dapat terjadi kembali di masa depan dan menjadi risiko;
2. Risiko yang telah disusun pada tahun sebelumnya yang kemungkinan dapat terjadi lagi di masa datang;
3. Melihat dari Risiko residu (risiko yang masih terjadi meskipun sudah dilakukan tindak pengendalian);
4. Melihat Komponen dari sasaran strategis yang masih menjadi permasalahan di masa datang (dari capaian yang masih rendah).

Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko melibatkan seluruh jajaran baik pimpinan maupun pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1 PENGERTIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2 TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 UNSUR-UNSUR SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut, yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-

komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

2.4 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga/ Gubernur / Bupati / Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi tujuan/sasaran sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif;
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2 KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kondisi lingkungan pengendalian Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang dilakukan pada tahun 2024 terhadap RTP pengendalian lingkungan (PL) periode penilaian tahun 2025 berdasarkan kuisisioner yang diisi oleh seluruh Perangkat Daerah pada Aplikasi MRI Tahun 2025. Berikut gambaran hasil kuisisioner lingkungan pengendalian Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026:

Tabel 1. Kondisi Lingkungan Pengendalian Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Memadai

Sumber: Aplikasi MRI, 2025

Dari 8 (delapan) sub unsur pada lingkungan pengendalian menunjukkan bahwa seluruhnya dalam kondisi Memadai. Hal ini dapat diartikan bahwa berdasarkan persepsi perangkat daerah menunjukkan kondisi lingkungan pengendalian di Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 (periode penilaian tahun 2025) dalam kondisi baik/ memadai.

Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi dari LHE dokumen Pemkab (LHE SAKIP dan LHPK/LHE SPIP 2024) menunjukkan masih adanya kekurangan/kelemahan pada beberapa unsur, antara lain:

1. Komitmen terhadap Kompetensi;
2. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

REKAPITULASI HASIL KUISIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

PEMDA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN PENILAIAN : Tahun 2025
TAHUN PERIODE : RPD Tahun 2024-2026

No	Pertanyaan/ Kuisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																												KESIMPULAN KUISIONER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28		R29	Modus
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA																													Memadai		
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	Memadai
2	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	2	4	3	3	3	3	4	4	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI																													Memadai		
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	2	3	3	2	4	3	3	3	4	1	2	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
3	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisiонер	JAWABAN KORESPONDED (R)																											KESIMPULAN KUOSIONER CEE			
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27		R28	R29	Modus
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																												Memadai			
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	2	4	3	3	3	4	4	4	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	Memadai	
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	4	4	4	3	2	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	2	4	3	3	3	4	3	4	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																												Memadai			
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	4	3	4	4	2	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisiонер	JAWABAN KORESPONDED (R)																												KESIMPULAN KUISIONER CEE		
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28		R29	Modus
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	2	3	4	3	2	4	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	2	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	1	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	2	4	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																												Memadai			
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	1	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	1	3	2	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	1	3	2	3	4	3	2	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																												Memadai			
1	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	2	4	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	2	4	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
4	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	2	3	4	3	2	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	4	4	3	1	3	3	4	3	4	3	4	3	4	2	3	4	3	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	2	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	Memadai

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																											KESIMPULAN KUOSIONER CEE			
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27		R28	R29	Modus
7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	2	3	3	3	1	3	4	3	2	3	3	3	3	4	3	3	Memadai	
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF																												Memadai			
1	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	2	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	2	3	4	4	2	4	4	3	3	4	4	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	2	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																												Memadai			
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	Memadai

Data Responden:

R1. Pemkab Banyumas

R2. Dindik

R3. Dinkes

R4. RSUD Banyumas

R5. RSUD Ajibarang

R6. DPU

R7. Dinperkim

R8. BPBD

R9. Kesbangpol

R10. Satpol PP

R11. Dinsospermasdes

R12. Dinakerkop UKM

R13. DLH

R14. Dindukcapil

R15. DPPKBP3A

R16. Dinhub

R17. Dinkominfo

R18. DPMPSTP

R19. Dinporabudpar

R20. Dinarpusda

R21. Dinkannak

R22. Dinperten KP

R23. Dinperindag

R24. Setda

R25. Setwan

R26. Inspektorat

R27. Bappedalitbang

R28. BKAD

R29. BKPSDM

**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Banyumas**

PEMDA : **PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**
TAHUN PENILAIAN : **TAHUN 2025**
TAHUN PERIODE : **RPD TAHUN 2024-2026**

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
a	b	c	d	e
1	LHE SAKIP 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa indikator kinerja belum memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan, dan cukup; 2. Pohon kinerja yang disusun belum teridentifikasi critical success factor (CSF) yang secara tepat menggambarkan permasalahan faktual yang terjadi; 3. Pohon kinerja masih sebatas menerjemahkan kondisi eksisting dan belum mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kab. Banyumas telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPD Tahun 2024-2026 yang dijabarkan dalam Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen lainnya tingkat Pemerintah daerah dan Perangkat daerah dengan kualitas baik; 2. Perencanaan kinerja sudah terakomodir melalui aplikasi e-RPJMD, e-RPD, e-Renstra; 3. Pohon kinerja pada level perangkat daerah telah disusun 	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
2	LHE SAKIP 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselarasan IKU dan PK pada perangkat daerah masih perlu ditinjau lagi; 2. Belum semua perangkat daerah memanfaatkan monev kinerja sebagai bagian dari dialog kinerja, khususnya terhadap capaian kinerja yang belum sesuai target; 3. Pengintegrasian aplikasi terpadu manajemen kinerja mulai dari e-RPJMD, e-RPD, e-Renstra, e-SAKIP, e-Monev, Satria, Jegos dan Simpatik ke dalam satu aplikasi terpadu masih berjalan sebagian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kab. Banyumas dan Perangkat daerah telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja, dan rencana aksinya kepada seluruh perangkat daerah; 2. Monev kinerja telah dilakukan secara berkala melalui aplikasi e-SAKIP 	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
3	LHE SAKIP 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kinerja pada level perangkat daerah belum cukup menyampaikan analisis terkait pencapaian kinerja secara mendalam, dan faktor pendukung/penghambat kinerja serta alternatif/ solusi ke depan; 2. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya 	Pemerintah Kab. Banyumas telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 untuk tingkat Pemda maupun Perangkat Daerah	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
4	LHE SAKIP 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada sebagian Perangkat Daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat dan monev atas tindak lanjut/perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah; 2. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level pusat 	Inspektorat Kab. Banyumas telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
a	b	c	d	e
5	LHPK SPIP 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sasaran dan indikator sasaran pada level strategis OPD yang tidak selaras dengan sasaran di atasnya; 2. Terdapat sasaran dan indikator kinerja level strategis Pemda, strategis OPD, program dan kegiatan yang tidak berorientasi hasil; 3. Terdapat target kinerja strategis Pemda, strategis OPD, program, kegiatan dan subkegiatan yang tidak memperhatikan capaian tahun lalu dan tidak SMART 	Pemerintah Kab Banyumas memiliki sasaran strategis terkait pengentasan kemiskinan, peningkatan akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
6	LHPK SPIP 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas register risiko dan rencana tindak pengendalian belum optimal; 2. Belum optimalnya pemahaman SDM tentang pengelolaan risiko secara substansi maupun teknis; 3. Masih terdapat pihak terkait yang menganggap bahwa risiko adalah hal yang tidak seharusnya diungkap, sehingga proses identifikasi dan analisis risiko masih dilakukan secara konservatif; 4. Adanya RTP yang kurang relevan dan tidak diimplementasikan serta dievaluasi secara optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Register risiko dan RTP telah disusun pada level strategis Pemerintah Daerah, strategis OPD dan operasional OPD; 2. Meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan risiko melalui pelaksanaan Bimtek, Workshop, dan Sosialisasi 	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut;

Kolom b diisi dengan sumber data;

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau;

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan;

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

3.3 RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Form 1.c.

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Banyumas

PEMDA : PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN PENILAIAN : 2025
TAHUN PERIODE : 2024-2026

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Kurang Memadai	<ol style="list-style-type: none"> Beberapa indikator kinerja belum memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan, dan cukup; Pohon kinerja yang disusun belum teridentifikasi critical success factor (CSF) yang secara tepat menggambarkan permasalahan faktual yang terjadi; Pohon kinerja masih sebatas menerjemahkan kondisi eksisting dan belum mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan kinerja 	Memadai		Kurang Memadai	<ol style="list-style-type: none"> Beberapa indikator kinerja belum memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan, dan cukup; Pohon kinerja yang disusun belum teridentifikasi critical success factor (CSF) yang secara tepat menggambarkan permasalahan faktual yang terjadi; Pohon kinerja masih sebatas menerjemahkan kondisi eksisting dan belum mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan kinerja
			<ol style="list-style-type: none"> Kualitas register risiko dan rencana tindak pengendalian belum optimal; Belum optimalnya pemahaman SDM tentang pengelolaan risiko secara substansi maupun teknis; Masih terdapat pihak terkait yang menganggap bahwa risiko adalah hal yang tidak seharusnya diungkap, sehingga proses identifikasi dan analisis risiko masih dilakukan secara konservatif; Adanya RTP yang kurang relevan dan tidak diimplementasikan serta dievaluasi secara optimal 				<ol style="list-style-type: none"> Kualitas register risiko dan rencana tindak pengendalian belum optimal; Belum optimalnya pemahaman SDM tentang pengelolaan risiko secara substansi maupun teknis; Masih terdapat pihak terkait yang menganggap bahwa risiko adalah hal yang tidak seharusnya diungkap, sehingga proses identifikasi dan analisis risiko masih dilakukan secara konservatif; Adanya RTP yang kurang relevan dan tidak diimplementasikan serta dievaluasi secara optimal

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
			<ol style="list-style-type: none"> Laporan kinerja pada level perangkat daerah belum cukup menyampaikan analisis terkait pencapaian kinerja secara mendalam, dan faktor pendukung/penghambat kinerja serta alternatif/ solusi ke depan; Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya 				<ol style="list-style-type: none"> Laporan kinerja pada level perangkat daerah belum cukup menyampaikan analisis terkait pencapaian kinerja secara mendalam, dan faktor pendukung/penghambat kinerja serta alternatif/ solusi ke depan; Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya
			<ol style="list-style-type: none"> Masih ada sebagian Perangkat Daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat dan monev atas tindak lanjut/perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah; Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level pusat 				<ol style="list-style-type: none"> Masih ada sebagian Perangkat Daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat dan monev atas tindak lanjut/perbaikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah; Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada level pusat
			<ol style="list-style-type: none"> Terdapat sasaran dan indikator sasaran pada level strategis OPD yang tidak selaras dengan sasaran di atasnya; Terdapat sasaran dan indikator kinerja level strategis Pemda, strategis OPD, program dan kegiatan yang tidak berorientasi hasil; Terdapat target kinerja strategis Pemda, strategis OPD, program, kegiatan dan subkegiatan yang tidak memperhatikan capaian tahun lalu dan tidak SMART 				<ol style="list-style-type: none"> Terdapat sasaran dan indikator sasaran pada level strategis OPD yang tidak selaras dengan sasaran di atasnya; Terdapat sasaran dan indikator kinerja level strategis Pemda, strategis OPD, program dan kegiatan yang tidak berorientasi hasil; Terdapat target kinerja strategis Pemda, strategis OPD, program, kegiatan dan subkegiatan yang tidak memperhatikan capaian tahun lalu dan tidak SMART
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	-	-	Memadai		-	
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	-	-	Memadai		-	

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Kurang Memadai	1. Keselarasan IKU dan PK pada perangkat daerah masih perlu ditinjau lagi; 2. Belum semua perangkat daerah memanfaatkan monev kinerja sebagai bagian dari dialog kinerja, khususnya terhadap capaian kinerja yang belum sesuai target; 3. Pengintegrasian aplikasi terpadu manajemen kinerja mulai dari e-RPJMD, e-RPD, e-Renstra, e-SAKIP, e-Monev, Satria, Jegos dan Simpatik ke dalam satu aplikasi terpadu masih berjalan sebagian	Memadai		Kurang Memadai	1. Keselarasan IKU dan PK pada perangkat daerah masih perlu ditinjau lagi; 2. Belum semua perangkat daerah memanfaatkan monev kinerja sebagai bagian dari dialog kinerja, khususnya terhadap capaian kinerja yang belum sesuai target; 3. Pengintegrasian aplikasi terpadu manajemen kinerja mulai dari e-RPJMD, e-RPD, e-Renstra, e-SAKIP, e-Monev, Satria, Jegos dan Simpatik ke dalam satu aplikasi terpadu masih berjalan sebagian
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai		-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

BAB IV PENILAIAN RISIKO

4.1 PENETAPAN TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk pengelolaan risiko strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau RPJMD transisi disusun berdasarkan permasalahan atau isu strategis Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026, dikarenakan masa jabatan Bupati Banyumas sudah selesai dan pemilihan kepala daerah baru dilakukan pada tahun 2024 sehingga Kabupaten Banyumas dipimpin oleh pejabat Bupati dan tidak memiliki visi misi daerah.

Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 memiliki 4 (empat) tujuan dengan 7 (tujuh) indikator tujuan yang akan dicapai selama 3 (tiga) tahun. Di mana tujuan tersebut didukung dengan 20 (dua puluh) sasaran dan 26 (dua puluh enam) indikator sasaran daerah.

Namun pada tahun 2024 berdasarkan hasil rewiu cascading terhadap tujuan/sasaran Pemkab terdapat 4 (empat) indikator tambahan pada beberapa sasaran Pemkab, yaitu sasaran Mewujudkan ASN yang professional, Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif. Hal ini karena sasaran tersebut dianggap belum memenuhi kriteria indikator cukup dan terdapat indikator sasaran yang sudah diganti dengan indikator lain oleh Pusat. Beberapa indikator tambahan pada sasaran Pemkab tersebut antara lain: Nilai Sistem Merit, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Tata Kelola Pengadaan, dan Indeks Reformasi Hukum.

Tujuan, Sasaran dan indikator Sasaran beserta indikator tambahan Kabupaten Banyumas dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran beserta Indikator Tambahan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan		Sasaran			Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Tambahan	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing				1	Indeks Reformasi Birokrasi
		1	1.1	Mewujudkan ASN yang Profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN
					2	Nilai Sistem Merit
		2	1.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)
				4	Indeks Pelayanan Publik	

Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Indikator Tambahan				
		3	1.3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	5	Nilai Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi		
				6	Indeks Tata Kelola Pengadaan			
				7	Indeks Reformasi Hukum			
				8	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			
				9	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
				10	Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah			
				11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah				2	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
				4	2.1	Mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi daerah	12	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
							3	Indeks Daya Saing Daerah
				5	2.2	Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah	13	Angka Kriminalitas
				6	2.3	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah	14	Indeks Daya Saing Infrastruktur
				7	2.4	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan risiko bencana	15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
							16	Indeks Risiko Bencana (IRB)
8	2.5	Meningkatkan kapabilitas Riset dan Inovasi	17	Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi pada IDSD				
3	Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan SDM				4	Angka Kemiskinan		
				9	3.1	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	18	Indeks Kedalaman Kemiskinan
							5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
				10	3.2	Meningkatkan kesempatan kerja	19	Tingkat Kesempatan Kerja
					3.3	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	20	Angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SLTA
							6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
				12	3.4	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	21	Usia Harapan Hidup (UHH)
				13	3.5	Meningkatkan derajat pendidikan	22	Harapan Lama Sekolah
				14	3.6	Meningkatkan Literasi Masyarakat	23	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
				15	3.7	Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan Penduduk	24	Laju Pertumbuhan Penduduk
16	3.8	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	25	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
			26	Nilai Kota Layak Anak				
17	3.9	Meningkatkan kapabilitas dan daya saing pemuda	27	Tingkat Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan				
4	Memperkuat Ketahanan Pangan				7	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		
				18	4.1	Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri	28	Nilai aspek ketersediaan pangan dalam IKP
				19	4.2	Meningkatkan keterjangkauan pangan	29	Nilai aspek keterjangkauan pangan dalam IKP
20	4.3	Mengoptimalkan pemanfaatan pangan	30	Nilai aspek pemanfaatan pangan dalam IKP				

Sumber: Dokumen RPD Tahun 2024-2026, 2024

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMKAB
KABUPATEN BANYUMAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode Yang dinilai	: Periode RPD Tahun 2024-2026	
Sumber Data	: RPD 2024-2026	
Tujuan Strategis RPD	Tujuan 1	Memperkuat Ketahanan Pangan
	Tujuan 2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM
	Tujuan 3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
	Tujuan 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	Tujuan 1	Memperkuat Ketahanan Pangan
	Tujuan 2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM
	Tujuan 3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
	Tujuan 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing
Nama Dinas Terkait Tujuan 1	DINPERTAN KP	
	DINPERINDAG	
	DINKANNAK	
	DPU	
Nama Dinas Terkait Tujuan 2	DPPKBP3A	
	DPMPTSP	
	DINSOSPERMASDES	
	DINAKERKOP UKM	
	RSUD BANYUMAS	
	DINDIK	
	DINARPUSDA	
	RSUD AJIBARANG	
	DINKES	
	DINPORABUDPAR	
	DINPERKIM	
Nama Dinas Terkait Tujuan 3	DLH	
	BAPPEDA LITBANG	
	DPU	
	DINPERINDAG	
	DINPERTAN KP	
	DINPORABUDPAR	
	KESBANGPOL	
	DINAKERKOP UKM	
	DINHUB	
	DINPERKIM	
	SATPOL PP	
	BPBD	
	DINKANNAK	
Nama Dinas Terkait Tujuan 4	SETWAN	
	BAPPEDA LITBANG	
	DINKOMINFO	
	DINDUKCAPIL	
	DPMPTSP	
	DINSOSPERMASDES	

	INSPEKTORAT	
	SETDA	
	BKPSDM	
	BKAD	
	DINARPUSDA	
	BAPENDA	
	KEC. AJIBARANG	
	KEC. BANYUMAS	
	KEC. BATURRADEN	
	KEC. CILONGOK	
	KEC. GUMELAR	
	KEC. JATILAWANG	
	KEC. KALIBAGOR	
	KEC. KARANGLEWAS	
	KEC. KEBASEN	
	KEC. KEDUNGBANTENG	
	KEC. KEMBARAN	
	KEC. KEMRANJEN	
	KEC. LUMBIR	
	KEC. PATIKRAJA	
	KEC. PEKUNCEN	
	KEC. PURWOJATI	
	KEC. PWT BARAT	
	KEC. PWT TIMUR	
	KEC. PWT SELATAN	
	KEC. PWT UTARA	
	KEC. RAWALO	
	KEC. SOKARAJA	
	KEC. SOMAGEDE	
	KEC. SUMBANG	
	KEC. SUMPIUH	
	KEC. TAMBAK	
	KEC. WANGON	
Sasaran Strategis RPD	Sasaran 1.1	Mengoptimalkan pemanfaatan pangan
	Sasaran 1.2	Meningkatkan keterjangkauan pangan
	Sasaran 1.3	Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri
	Sasaran 2.1	Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan Penduduk
	Sasaran 2.2	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
	Sasaran 2.3	Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat
	Sasaran 2.5	Meningkatkan derajat pendidikan
	Sasaran 2.6	Meningkatkan kesempatan kerja
	Sasaran 2.7	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
	Sasaran 2.9	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
	Sasaran 2.10	Meningkatkan Literasi Masyarakat
	Sasaran 2.11	Meningkatnya kapabilitas dan daya saing Pemuda
Sasaran 3.1	Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	

	Sasaran 3.2	Meningkatkan kapabilitas Riset dan Inovasi
	Sasaran 3.4	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan resiko bencana
	Sasaran 3.5	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah
	Sasaran 3.6	Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah
	Sasaran 4.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
	Sasaran 4.2	Mewujudkan ASN yang Profesional
	Sasaran 4.7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif
Indikator Kinerja Sasaran RPD	1. Nilai aspek pemanfaatan pangan dalam IKP : 79.14 Nilai	
	2. Nilai aspek keterjangkauan pangan dalam IKP : 81.48 Nilai	
	3. Nilai aspek ketersediaan pangan dalam IKP : 83.43 Nilai	
	4. Laju Pertumbuhan Penduduk : 1.36 %	
	5. Indek Kedalaman Kemiskinan : 1.35 Indeks	
	6. Usia Harapan Hidup UHH : 73.96 Tahun	
	7. Harapan Lama Sekolah : 13.40 Tahun	
	8. Tingkat Kesempatan Kerja : 94.15 %	
	9. Angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SLTA : 93.53 %	
	10. Indek Pembangunan Gender IPG : 89.45 Indeks	
	11. Nilai Kota Layak Anak : 600 Nilai	
	12. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM : 38 Indeks	
	13. Tingkat Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan : 0.60 %	
	14. Nilai Produk Domestik Regional Bruto PDRB : 48330 Milyar Rupiah	
	15. Indeks Pilar kapabilitas inovasi pada IDSD : 2.95 Indeks	
	16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH : 64.20 Indeks	
	17. Indeks Resiko Bencana IRB : 152 Indeks	
	18. Indek daya saing infrastruktur : 3.42 Indeks	
	19. Angka Kriminalitas : 1.48 Angka	
	20. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik IPKP : 4.57 Indeks	
	21. Indeks Pelayanan Publik : 4.41 Indeks	
	22. Indeks Profesionalitas ASN : 71 Indeks	
	23. Nilai Sistem Merit : 300 Nilai	
	24. Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah : 100 %	
	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE : 3.3 Indeks	
	26. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP : 79 Nilai	
	27. Nilai Komponen Hasil Indek Reformasi Birokrasi : 33.05 Nilai	
	28. Indeks Tata Kelola Pengadaan : 70.1 Indeks	
	29. Indeks Reformasi Hukum : 75 Indeks	
	30. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP : 3.050	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<u>Tujuan 1</u> Memperkuat Ketahanan Pangan	
	<u>Tujuan 2</u> Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM	
	<u>Tujuan 3</u> Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	
	<u>Tujuan 4</u> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing	
	<u>Sasaran 1.1.</u> Mengoptimalkan pemanfaatan pangan	
	<u>Sasaran 1.2</u> Meningkatkan keterjangkauan pangan	
	<u>Sasaran 1.3</u> Meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri	
	<u>Sasaran 2.1</u> Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan Penduduk	

<u>Sasaran 2.2</u>	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
<u>Sasaran 2.3</u>	Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat
<u>Sasaran 2.4</u>	Meningkatkan derajat pendidikan
<u>Sasaran 2.5</u>	Meningkatkan kesempatan kerja
<u>Sasaran 2.6</u>	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja
<u>Sasaran 2.7</u>	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
<u>Sasaran 2.8</u>	Meningkatkan Literasi Masyarakat
<u>Sasaran 2.9</u>	Meningkatnya kapabilitas dan daya saing Pemuda
<u>Sasaran 3.1</u>	Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah
<u>Sasaran 3.2</u>	Meningkatkan kapabilitas Riset dan Inovasi
<u>Sasaran 3.3</u>	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan resiko bencana
<u>Sasaran 3.4</u>	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah
<u>Sasaran 3.5</u>	Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah
<u>Sasaran 4.1</u>	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
<u>Sasaran 4.2</u>	Mewujudkan ASN yang Profesional
<u>Sasaran 4.3</u>	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif
<u>Indikator 1.1.1</u>	Nilai aspek pemanfaatan pangan dalam IKP
<u>Indikator 1.2.1</u>	Nilai aspek keterjangkauan pangan dalam IKP
<u>Indikator 1.3.1</u>	Nilai aspek ketersediaan pangan dalam IKP
<u>Indikator 2.1.1</u>	Laju Pertumbuhan Penduduk
<u>Indikator 2.2.1</u>	Indek Kedalaman Kemiskinan
<u>Indikator 2.3.1</u>	Usia Harapan Hidup UHH
<u>Indikator 2.4.1</u>	Harapan Lama Sekolah
<u>Indikator 2.4.2</u>	Rata rata lama sekolah
<u>Indikator 2.5.1</u>	Tingkat Kesempatan Kerja
<u>Indikator 2.6.1</u>	Angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SLTA
<u>Indikator 2.7.1</u>	Indek Pembangunan Gender IPG
<u>Indikator 2.7.2</u>	Nilai Kota Layak Anak
<u>Indikator 2.8.1</u>	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM
<u>Indikator 2.9.1</u>	Tingkat Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan
<u>Indikator 3.1.1</u>	Nilai Produk Domestik Regional Bruto PDRB
<u>Indikator 3.2.1</u>	Indeks Pilar kapabilitas inovasi pada IDSD
<u>Indikator 3.3.1</u>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH
<u>Indikator 3.3.2</u>	Indeks Resiko Bencana IRB
<u>Indikator 3.4.1</u>	Indek daya saing infrastruktur
<u>Indikator 3.5.1</u>	Angka Kriminalitas
<u>Indikator 4.1.1</u>	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik IPKP
<u>Indikator 4.1.2</u>	Indeks Pelayanan Publik
<u>Indikator 4.2.1</u>	Indeks Profesionalitas ASN
<u>Indikator 4.2.2</u>	Nilai Sistem Merit
<u>Indikator 4.3.1</u>	Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah
<u>Indikator 4.3.2</u>	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE
<u>Indikator 4.3.3</u>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP
<u>Indikator 4.3.4</u>	Nilai Komponen Hasil Indek Reformasi Birokrasi
<u>Indikator 4.3.5</u>	Indeks Tata Kelola Pengadaan
<u>Indikator 4.3.6</u>	Indeks Reformasi Hukum
<u>Indikator 4.3.7</u>	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP

4.2 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Rincian identifikasi risiko dapat dilihat sebagai berikut:

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMKAB

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode Yang dinilai	: Periode RPD Tahun 2024-2026	
Sumber Data	: RPD 2024-2026	
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1	Memperkuat Ketahanan Pangan
	Tujuan 2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM
	Tujuan 3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
	Tujuan 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing											
1	Mewujudkan ASN yang Profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN	Adanya kesenjangan kompetensi ASN		Kepala Daerah	Pengembangan kompetensi ASN (pengetahuan, ketrampilan, sikap) belum intensif	Internal	C	1. Kinerja pemkab tidak tercapai; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap Layanan pemerintah daerah; 3. Karir ASN tidak berkembang	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat; 3. ASN	PEMKAB BANYUMAS
		2	Nilai Sistem Merit	Kinerja ASN belum sepenuhnya mendukung kinerja organisasi		Kepala Daerah	kebijakan pengelolaan/ manajemen ASN di Pemkab Banyumas belum terimplementasi dengan baik	Internal	C	1. Kinerja pemkab tidak tercapai; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap Layanan pemerintah daerah	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik IPKP	Adanya Aduan berulang terhadap pelayanan publik di Kabupaten Banyumas		Kepala Daerah	1. Aduan tidak ditindaklanjuti dengan segera; 2. Pelayanan tidak sesuai dengan standar; 3. Kurang sinerginya Pelayanan Publik Lintas Perangkat Daerah/Instansi Vertikal	Internal	C	1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; 2. Kinerja Pemkab dalam pelayanan publik menurun	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
		4	Indeks Pelayanan Publik									

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP	Masih tingginya persepsi korupsi		Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengendalian terhadap Fraud dalam penyelenggaraan pemerintahan; 2. Kurangnya kapabilitas SDM dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 	Internal	C	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap integritas pemkab; 2. Profesionalitas ASN rendah dalam mendukung pencapaian tujuan Pemkab 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat 	PEMKAB BANYUMAS
				Perencanaan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja organisasi yang menjadi dasar penentuan reward		Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum ada kebijakan yang mengatur pelaksanaan manajemen kinerja yang terintegrasi dari perencanaan sampai penilaian kinerja; 2. Masih belum efektifnya Implementasi Kebijakan Pemkab terkait Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja; 3. Kurangnya Partisipasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam pencapaian tujuan Pemkab; 4. Kebijakan reward dan punishment belum sepenuhnya mendasari pada perencanaan dan pengukuran kinerja 	Internal	C	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintah tidak akuntabel dan transparan; 2. Munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah; 3. Tujuan Pemerintah daerah tidak tercapai secara efektif dan efisien 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat 	PEMKAB BANYUMAS
				Perencanaan dan pengendalian yang diterapkan belum berbasis risiko		Kepala Daerah	Aturan yang dipedomani dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian dengan aturan yang dipedomani dalam pengelolaan risiko berbeda	Eksternal	C	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan pengendalian yang ada belum efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi; 2. Masyarakat tidak merasakan hasil pembangunan yang nyata 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat 	PEMKAB BANYUMAS

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
							1. belum adanya kebijakan pedoman penyusunan perencanaan berbasis risiko; 2. kebijakan pengelolaan risiko belum mengakomodir kebijakan perencanaan; 3. sistem informasi perencanaan dan pengelolaan risiko belum terintegrasi sepenuhnya	Internal	C	1. Perencanaan dan pengendalian yang ada belum efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi; 2. Masyarakat tidak merasakan hasil pembangunan yang nyata	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
		6	Nilai Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi	Kinerja individu dan OPD belum mendukung Tujuan Reformasi Birokrasi Pemkab		Kepala Daerah	Kurangnya komitmen dan pemahaman semua Pimpinan OPD untuk mengimplementasikan kebijakan Reformasi Birokrasi	Internal	C	1. Tidak terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan apartur yang berintegritas tinggi, produktif, dan pelayanan prima; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
		7	Indeks Tata Kelola Pengadaan	kurangnya standar pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan		Kepala Daerah	1. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya mengatur standar pengadaan barang dan jasa secara tepat dan masih memberikan celah bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan kecurangan; 2. kualifikasi dan kompetensi SDM pengelola barang dan jasa (PBJ) masih kurang; 3. masih kurangnya pemanfaatan penggunaan sistem pengadaan (Non e-Tendering dan e-Purchasing, e-Kontrak); 4. Belum optimalnya tingkat kematangan UKPBJ	Internal	C	1. Adanya pertukaran kepentingan pemangku kepentingan pengadaan/ terjadinya penyimpangan; 2. Belum optimalnya penilaian Monitoring Center Prevention (MCP) oleh KPK; 3. Tidak terwujudnya reformasi birokrasi / tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adaptif, transparan, akuntabel; 4. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
		8	Indeks Reformasi Hukum	Masih rendahnya tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk		Kepala Daerah	1. Belum ada kebijakan yang mengatur tata kelola pemerintahan secara menyeluruh; 2. Kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah	Internal	C	1. Kebijakan pembangunan kurang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat; 2. Tidak terwujudnya Birokrasi yang kapabel; 3. Rendahnya kualitas reformasi hukum pemerintah daerah	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
				melakukan harmonisasi regulasi			yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD, dan Kepala Daerah belum sesuai; 3. Masih rendahnya keterlibatan pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan; 4. Masih rendahnya Kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan					
		9	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP	Pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan Pemkab		Kepala Daerah	1. Belum adanya kebijakan pedoman penyusunan perencanaan berbasis risiko atau kebijakan pengelolaan risiko belum mengakomodir kebijakan perencanaan; 2. Sistem informasi perencanaan dan pengelolaan risiko belum terintegrasi sepenuhnya; 3. Kualitas pengelolaan risiko dan RTP belum optimal; 4. kualitas SDM terhadap pengelolaan risiko secara substansi dan teknis masih kurang; 5. kualitas penetapan tujuan belum optimal; 6. Masih adanya temuan berulang terkait keuangan, aset, maupun ketaatan peraturan perundang-undangan	Internal	C	1. Tujuan pemerintah banyumas tidak tercapai secara efektif dan efisien; 2. Identifikasi risiko tidak tepat dan Rencana tindak pengendalian (RTP) terhadap risiko kurang relevan; 3. Hasil pembangunan tidak dirasakan secara nyata oleh masyarakat	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
		10	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE	Penyelenggaraan pemerintah belum sepenuhnya terintegrasi, tersistematis dan terpadu dalam memanfaatkan TIK		Kepala Daerah	1. Belum adanya kebijakan terkait arah dan langkah pelaksanaan SPBE yang terintegrasi; 2. Belum adanya kebijakan pelaksanaan manajemen risiko SPBE yang terintegrasi	Internal	C	1. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel tidak terwujud; 2. Rendahnya kualitas pelayanan publik; 3. Meningkatkan beban anggaran; 4. Rendahnya kepuasan masyarakat; 5. Tingginya risiko terhadap sistem keamanan informasi	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
		11	Capaian Opini BPK status WTP terhadap laporan keuangan daerah	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk pelaksanaan pembangunan		Kepala Daerah	1. Belum adanya strategi pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset daerah; 2. Masih rendahnya SDM pengelola keuangan dan aset daerah	Internal	C	Menurunnya akuntabilitas laporan keuangan daerah	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
			Masih lemahnya tingkat kemandirian fiskal daerah		Kepala Daerah	Belum adanya strategi peningkatan pendapatan daerah	Internal	C	Pembangunan tidak terealisasi sesuai perencanaan	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS	
2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM											
4	Meningkatkan kesempatan kerja	12	Tingkat Kesempatan Kerja	Masih banyaknya angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan		Kepala Daerah	kurang efektifnya strategi pemerintah dalam implementasi peningkatan kesempatan kerja;	Internal	C	1. Meningkatkan angka pengangguran Kabupaten Banyumas; 2. Meningkatkan angka kemiskinan; 3. Masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
							Kurangnya jenis pelatihan yang dibutuhkan tenaga kerja	Internal	C	1. Meningkatkan angka pengangguran Kabupaten Banyumas; 2. Meningkatkan angka kemiskinan; 3. Masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
							Rendahnya UMK Banyumas	Eksternal	UC	1. Meningkatkan angka pengangguran Kabupaten Banyumas; 2. Meningkatkan angka kemiskinan; 3. Masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
							Masih rendahnya penerapan tata kelola ketenagakerjaan yang layak oleh perusahaan penyedia kerja;	Eksternal	C	1. Meningkatkan angka pengangguran Kabupaten Banyumas; 2. Meningkatkan angka kemiskinan; 3. Masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
							ketidaksiuaian kompetensi yang dimiliki dengan yang dibutuhkan dalam pasar kerja;	Eksternal	C	1. Meningkatkan angka pengangguran Kabupaten Banyumas; 2. Meningkatkan angka kemiskinan; 3. Masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
5	Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja	13	Angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan minimal SLTA	Masih banyaknya angkatan kerja dengan pendidikan rendah		Kepala Daerah	1. Akses pendidikan menengah dan tinggi yang sulit; 2. Keterbatasan angkatan kerja untuk mendapatkan pelatihan;	Internal	C	1. Tingginya pengangguran terbuka; 2. Angkatan kerja kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang dibutuhkan pasar kerja; 3. Meningkatnya kesenjangan ekonomi masyarakat; 4. Rendahnya produktivitas dan rata-rata upah pekerja	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (angkatan kerja)	PEMKAB BANYUMAS
							Ketidakmampuan kondisi ekonomi masyarakat			Eksternal		

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
6	Meningkatkan derajat pendidikan	14	Harapan Lama Sekolah	Layanan pendidikan belum sesuai standar		Kepala Daerah	1. belum meratanya pemenuhan sarana prasarana pada satuan pendidikan secara memadai; 2. belum meratanya pemenuhan SDM pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan;	Internal	C	1. Tingkat Pendidikan masyarakat rendah; 2. Kualitas pendidikan masyarakat rendah	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
				Warga Usia Sekolah Tidak Bersekolah		Kepala Daerah	Kondisi Sosial Ekonomi Rendah	Eksternal	UC	1. Tingkat Pendidikan masyarakat rendah; 2. Kualitas pendidikan masyarakat rendah	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
7	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	15	Nilai Kota Layak Anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak dalam keluarga		Kepala Daerah	Kurangnya kualitas keluarga (ketentraman, kemandirian, kebahagiaan)	Eksternal	C	1. Terganggunya Psikologis anak yang kurang baik; 2. Rendahnya kesejahteraan keluarga; 3. Timbulnya reputasi Kabupaten Banyumas tidak layak anak	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (khususnya anak).	PEMKAB BANYUMAS
				Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan hak perlindungan khusus bagi anak berhadapan hukum di Kabupaten Banyumas belum optimal		Kepala Daerah	Komunikasi informasi kebijakan KLA masih kurang jelas dan mendetail	Eksternal	C	1. Timbulnya reputasi Kabupaten Banyumas tidak layak anak; 2. Tidak terpenuhinya hak anak/ tidak terlindungi	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (anak)	PEMKAB BANYUMAS
							Belum adanya regulasi khusus terkait pelaksanaan KLA	Internal	C	1. Timbulnya reputasi Kabupaten Banyumas tidak layak anak; 2. Tidak terpenuhinya hak anak/ tidak terlindungi	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (anak)	PEMKAB BANYUMAS
							Belum tersusunnya RAD terkait Kabupaten Layak Anak	Internal	C	1. Timbulnya reputasi Kabupaten Banyumas tidak layak anak; 2. Tidak terpenuhinya hak anak/ tidak terlindungi	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (anak)	PEMKAB BANYUMAS
							Belum tersedianya fasilitas pusat rehabilitasi shelter, LPKA, dan BLK;	Internal	C	1. Timbulnya reputasi Kabupaten Banyumas tidak layak anak; 2. Tidak terpenuhinya hak anak/ tidak terlindungi	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (anak)	PEMKAB BANYUMAS
			Tumpang tindih kewenangan antara Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT - PKBGA) dan pekerja sosial;	Eksternal	C	1. Timbulnya reputasi Kabupaten Banyumas tidak layak anak; 2. Tidak terpenuhinya hak anak/ tidak terlindungi	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (Anak)	PEMKAB BANYUMAS				

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
		16	Indek Pembangunan Gender IPG	kesenjangan tingkat pendidikan antar gender masih tinggi		Kepala Daerah	1. masih rendahnya pemberdayaan terhadap perempuan; 2. masih rendahnya akses pendidikan untuk perempuan	Internal	C	1. Tingkat pendidikan perempuan masih rendah; 2. Tingkat ekonomi perempuan masih rendah; 3. tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah; 4. Rendahnya kualitas keluarga; 5. Pembangunan belum responsif gender	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (Perempuan, Keluarga, Anak);	PEMKAB BANYUMAS
8	Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat	17	Usia Harapan Hidup UHH	Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar		Kepala Daerah	Tidak terpantaunya sasaran yang seharusnya menerima pelayanan kesehatan dasar	Internal	C	1. Banyaknya masyarakat yang menderita penyakit; 2. Rendahnya kualitas kesehatan Keluarga Kab Banyumas; 3. Tingginya kematian pada ibu dan bayi; 4. Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah kabupaten banyumas	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
9	Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan Penduduk	18	Laju Pertumbuhan Penduduk	Peningkatan jumlah kelahiran penduduk yang tinggi		Kepala Daerah	Banyaknya pernikahan usia muda	Eksternal	UC	3. Rendahnya stabilitas daerah; 4. Tingginya permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus diselesaikan pemerintah; 5. Terhambatnya pencapaian tujuan pemkab; 6. Kesejahteraan/ Kualitas hidup masyarakat dalam keluarga rendah.	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
							Implementasi program pengendalian penduduk belum efektif	Internal	C	1. Rendahnya stabilitas daerah; 2. Tingginya permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan; 3. Terhambatnya pencapaian tujuan pemkab; 4. Kesejahteraan/ Kualitas hidup masyarakat dalam keluarga rendah.	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
							Cara pandang/ keyakinan masyarakat "Banyak anak banyak rejeki"	Eksternal	UC	1. Rendahnya stabilitas daerah; 2. Tingginya permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus diselesaikan pemerintah; 3. Terhambatnya pencapaian tujuan pemkab; 4. Kesejahteraan/ Kualitas hidup masyarakat dalam keluarga rendah.	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
				Urbanisasi penduduk (desa ke kota) tinggi		Kepala Daerah	Peluang pekerjaan lebih banyak di perkotaan / peluang kehidupan yang lebih layak	Eksternal	UC	1. Ketidakseimbangan/ ketidakraturan wilayah perkotaan dengan pedesaan (polusi udara, kemacetan, lingkungan kumuh, kriminalitas, dll); 2. Ketimpangan pendapatan, pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
						Kepala Daerah	Sarana prasarana perkotaan yang lebih lengkap/ memadai;	Eksternal	C	1. Ketidakseimbangan/ ketidakraturan wilayah perkotaan dengan pedesaan (polusi udara, kemacetan, lingkungan kumuh, kriminalitas, dll); 2. Ketimpangan pendapatan, pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya.	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
10	Meningkatnya kapabilitas dan daya saing Pemuda	19	Tingkat Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Kurang berkembangnya potensi pemuda		Kepala Daerah	1. Rendahnya ketertarikan dan kompetensi pemuda terhadap kewirausahaan dan olahraga; 2. Kurangnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Eksternal	C	1. Rendahnya tingkat produktivitas pemuda; 2. Meningkatnya jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas (khususnya pemuda); 3. Menurunnya prestasi pemuda.	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (pemuda).	PEMKAB BANYUMAS
						Kepala Daerah	kurangnya strategi dan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam pemajuan pembangunan kepemudaan.	Internal	C	1. Rendahnya tingkat produktivitas pemuda; 2. Meningkatnya jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas (khususnya pemuda) 3. Menurunnya prestasi pemuda.	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (pemuda).	PEMKAB BANYUMAS

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
11	Meningkatkan Literasi Masyarakat	20	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM	Kurangnya pemanfaatan perpustakaan		Kepala Daerah	Masih adanya perpustakaan yang belum berstandar	Internal	C	1. Rendahnya wawasan masyarakat; 2. Rendahnya kualitas SDM masyarakat; 3. Rendahnya capaian kinerja literasi Daerah Kab. Banyumas	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
12	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	21	Indek Kedalaman Kemiskinan	Belum semua masyarakat miskin terintervensi bantuan		Kepala Daerah	1. Belum adanya prioritas sasaran penerima bantuan sesuai kebutuhan; 2. Kurangnya kolaborasi antar stakeholder dalam pemberian bantuan; 3. belum adanya strategi yang efektif dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.	Internal	C	1. tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam penanganan kemiskinan; 2. Tingginya angka kemiskinan; 3. Rendahnya kualitas hidup masyarakat;	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (warga miskin)	PEMKAB BANYUMAS
				Masyarakat miskin tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatan		Kepala Daerah	Kurangnya fasilitasi bagi warga miskin untuk meningkatkan kompetensi	Internal	C	1. Tingginya angka pengangguran; 2. Rendahnya upah yang diperoleh warga miskin; 3. Tingginya angka kemiskinan; 4. Rendahnya kualitas hidup masyarakat miskin	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (warga miskin)	PEMKAB BANYUMAS
							Rendahnya tingkat pendidikan warga miskin	Eksternal	C	1. Tingginya angka pengangguran; 2. Rendahnya upah yang diperoleh warga miskin; 3. Tingginya angka kemiskinan; 4. Rendahnya kualitas hidup masyarakat miskin	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (warga miskin)	PEMKAB BANYUMAS
							Rendahnya motivasi warga miskin dalam berusaha	Eksternal	UC	1. Tingginya angka pengangguran; 2. Rendahnya upah yang diperoleh warga miskin; 3. Tingginya angka kemiskinan; 4. Rendahnya kualitas hidup masyarakat miskin	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (warga miskin)	PEMKAB BANYUMAS
							Kurangnya peluang usaha yang tersedia	Eksternal	UC	1. Tingginya angka pengangguran; 2. Rendahnya upah yang diperoleh warga miskin; 3. Tingginya angka kemiskinan; 4. Rendahnya kualitas hidup masyarakat miskin	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (warga miskin)	PEMKAB BANYUMAS

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah											
13	Meningkatkan stabilitas keamanan wilayah	22	Angka Kriminalitas	Terjadinya gangguan tantribum		Kepala Daerah	kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ipoleksosbudhankam	Eksternal	C	1. Terganggunya rasa aman masyarakat; 2. Berkurangnya stabilitas daerah yang berdampak pada seluruh sektor pembangunan	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
							Kurangnya efektivitas peran Formkompimda	Internal	C	1. Terganggunya rasa aman masyarakat; 2. Berkurangnya stabilitas daerah yang berdampak pada seluruh sektor pembangunan	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
14	Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah	23	Indek daya saing infrastruktur	Menurunnya fungsi infrastruktur jaringan jalan dan irigasi		Kepala Daerah	Penanganan infrastruktur belum sesuai prioritas	Internal	C	1. Menurunnya hasil Produksi pertanian karena tidak optimalnya fungsi jaringan irigasi; 2. terganggunya konektivitas antar wilayah	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
				Pemanfaatan layanan Instalasi Pengolahan lumpur tinja (IPLT) belum optimal		Kepala Daerah	Tarif retribusi layanan IPLT belum memperhatikan kondisi objek retribusi	Internal	C	1. Akses air limbah yang aman rendah; 2. Terjadinya pencemaran lingkungan pada tempat tinggal masyarakat; 3. Terganggunya kualitas kesehatan masyarakat	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
							Kurangnya SDM pengelola IPLT	Internal	C	1. Akses air limbah yang aman rendah; 2. Terjadinya pencemaran lingkungan pada tempat tinggal masyarakat; 3. Terganggunya kualitas kesehatan masyarakat	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
							Kurangnya infrastruktur pengolahan lumpur tinja	Internal	C	1. Akses air limbah yang aman rendah; 2. Terjadinya pencemaran lingkungan pada tempat tinggal masyarakat;	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
							Rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlunya pengolahan lumpur tinja	Eksternal	C	3. Terganggunya kualitas kesehatan Masyarakat 1. Akses air limbah yang aman rendah; 2. Terjadinya pencemaran lingkungan pada tempat tinggal masyarakat; 3. Terganggunya kualitas kesehatan masyarakat	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
							Belum adanya kebijakan yang mengatur terkait pelayanan air limbah domestik	Internal	C	1. Akses air limbah yang aman rendah; 2. Terjadinya pencemaran lingkungan pada tempat tinggal masyarakat; 3. Terganggunya kualitas kesehatan masyarakat	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
				Pemanfaatan transportasi umum belum optimal		Kepala Daerah	1. Layanan transportasi tidak sesuai kebutuhan; 2. Layanan transportasi belum terintegrasi; 3. Layanan transportasi kalah saing dengan moda transportasi privat atau pribadi	Internal	C	1. Meningkatnya kemacetan; 2. Layanan transportasi kurang efektif; 3. Kurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
15	Meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan menurunkan resiko bencana	24	Indeks Resiko Bencana IRB	Kurangnya ketahanan daerah terhadap bencana		Kepala Daerah	1. Belum optimalnya peran Forum Pengurangan Risiko Bencana di beberapa wilayah tertentu; 2. Belum adanya Rencana Kontijensi Bencana untuk semua jenis bencana; 3. Kurangnya ketersediaan Early Warning System.	Internal	C	1. Meningkatnya kerugian (gangguan ekonomi, kesehatan, kehilangan nyawa, terhambat aktivitas, kerusakan bangunan, dll) masyarakat akibat bencana; 2. Tidak tercapainya kinerja pemerintah dalam penanggulangan bencana; 3. Meningkatnya kerusakan lingkungan	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
		25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH	Penurunan kualitas lingkungan hidup dan ancaman perubahan iklim		Kepala Daerah	Penurunan daya dukung air	Eksternal	C	1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup; 2. Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat; 3. Tidak tercapainya Kinerja Pemkab terkait pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
							Meningkatnya emisi gas rumah kaca	Eksternal	UC	1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup; 2. Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat; 3. Tidak tercapainya Kinerja Pemkab terkait pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
							Terjadinya pencemaran lingkungan	Eksternal	C	1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup; 2. Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat; 3. Tidak tercapainya Kinerja Pemkab terkait pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
							Belum ada kebijakan terkait rencana induk RTH Publik	Internal	C	1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup; 2. Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat; 3. Tidak tercapainya Kinerja Pemkab terkait pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
16	Meningkatkan kapabilitas Riset dan Inovasi	26	Indeks Pilar kapabilitas inovasi pada IDSD	Kualitas riset daerah masih rendah		Kepala Daerah	kurangnya objek yang akan difasilitasi kekayaan intelektual	Eksternal	C	1. Ekosistem riset dan inovasi daerah rendah; 2. Pertumbuhan ekonomi lambat; 3. Budaya inovasi di masyarakat tidak berkembang	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
							1. Kurangnya publikasi ilmiah; 2. belum diimplementasikannya kebijakan terkait riset dan inovasi; 3. Belanja riset masih rendah; 4. Masih rendahnya kualitas Pelaku/lembaga riset daerah	Internal	C	1. Ekosistem riset dan inovasi daerah rendah; 2. Pertumbuhan ekonomi lambat; 3. Budaya inovasi di masyarakat tidak berkembang	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
17	Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	27	Nilai Produk Domestik Regional Bruto PDRB	Ekonomi Kreatif tidak berkembang		Kepala Daerah	Belum adanya kebijakan strategi pengembangan ekonomi kreatif	Internal	C	1. Nilai PDRB tidak optimal; 2. Rendahnya pendapatan pelaku ekraf; 3. Produk ekraf tidak berkembang	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (pelaku ekraf)	PEMKAB BANYUMAS

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
				Kontribusi pariwisata terhadap PAD masih rendah		Kepala Daerah	1. Kurangnya daya tarik wisata; 2. Belum adanya Kebijakan Pengembangan Pariwisata	Internal	C	1. PDRB dan PAD tidak meningkat; 2. Redahnya pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
				Kuranginya daya saing usaha mikro		Kepala Daerah	kurangnya kualitas produk usaha mikro	Eksternal	C	1. Menurunnya PDRB sektor industri dan perdagangan; 2. Rendahnya pendapatan pelaku usaha mikro; 3. Usaha mikro tidak berkembang; 4. Nilai ekspor tidak meningkat	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (pelaku usaha mikro)	PEMKAB BANYUMAS
					1. Kurangnya akses permodalan; 2. kurangnya skill/kemampuan SDM pelaku usaha mikro							
				Nilai tambah produk unggulan sektor pertanian tidak meningkat		Kepala Daerah	1. Belum adanya kebijakan penetapan dan prioritas produk unggulan daerah di sektor pertanian; 2. Belum adanya Strategi pengembangan produk unggulan daerah di sektor pertanian.	Internal	C	1. Kinerja Pemkab dalam meningkatkan ekonomi daerah tidak tercapai; 2. Pendapatan masyarakat khususnya para petani tidak mengalami peningkatan	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat (petani)	PEMKAB BANYUMAS
				Rendahnya minat investor yang berinvestasi		Kepala Daerah	1. Belum adanya kebijakan pemetaan wilayah investasi; 2. Masih rendahnya dukungan infrastruktur yang memadai untuk investasi; 3. RTRW atau tata ruang yang tidak sesuai dengan investasi yang ada; 4. Belum adanya kawasan industri.	Internal	C	1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah; 2. Rendahnya penyerapan tenaga kerja; 3. Rendahnya investor yang melakukan kesepakatan berinvestasi (Lol)	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
4	Memperkuat Ketahanan Pangan											
18	Meningkatkan ketersediaan	28	Nilai aspek ketersediaan pangan dalam IKP	Penurunan Daya dukung pangan		Kepala Daerah	Terjadinya penurunan produktivitas lahan komoditas pangan pertanian dan perikanan	Eksternal	C	1. Tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam penyediaan pangan;	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
	pangan secara mandiri									2. Kebutuhan pangan masyarakat tidak terpenuhi		
							1. Alih fungsi lahan pertanian secara terus-menerus; 2. Terjadinya wabah/ bencana pertanian	Eksternal	UC	1. Tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam penyediaan pangan; 2. Kebutuhan pangan masyarakat tidak terpenuhi	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
19	Meningkatkan keterjangkauan pangan	29	Nilai aspek keterjangkauan pangan dalam IKP	Masih adanya desa rawan pangan		Kepala Daerah	Kurangnya akses secara ekonomi bagi individu/ rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup	Internal	C	Tidak terpenuhinya pangan masyarakat di beberapa wilayah	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
							Adanya bencana alam	Eksternal	UC	Tidak terpenuhinya pangan masyarakat di beberapa wilayah	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
							Kurangnya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup	Internal	C	Tidak terpenuhinya pangan masyarakat di beberapa wilayah	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS
20	Mengoptimalkan pemanfaatan pangan	30	Nilai aspek pemanfaatan pangan dalam IKP	Konsumsi pangan belum ideal		Kepala Daerah	1. Kurangnya penganekaragaman konsumsi dan olahan pangan masyarakat; 2. Kurangnya keamanan pangan; 3. kurang efisiennya pemanfaatan pangan	Internal	C	1. Tingginya konsumsi pangan yang tidak sehat (bergizi seimbang); 2. Meningkatnya risiko penyakit/ pertumbuhan kesehatan masyarakat yang kurang baik; 3. Tidak tercapainya kinerja pemerintah dalam pemanfaatan pangan yang ideal bagi masyarakat	1. Kepala Daerah; 2. Masyarakat	PEMKAB BANYUMAS

Sumber: Aplikasi MRI 2025

4.3 ANALISIS RISIKO

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4. Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai tinggi. Berikut adalah daftar risiko prioritas dari hasil analisis risiko Pemerintah Kabupaten Banyumas :

Form 4

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
1	Adanya kesenjangan kompetensi ASN	RSP.25		1	1	3.1	2.8	8.68
2	Kinerja ASN belum sepenuhnya mendukung kinerja organisasi	RSP.25		1	1	3.1	2.6	8.06
3	Belum terpenuhinya hak-hak anak dalam keluarga	RSP.25		1	1	3.0	2.4	7.2
4	Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan hak perlindungan khusus bagi anak berhadapan hukum di Kabupaten Banyumas belum optimal	RSP.25		1	1	2.9	2.3	6.67
5	kesenjangan tingkat pendidikan antar gender masih tinggi	RSP.25		1	1	2.8	2.4	6.72
6	Terjadinya gangguan tantrium	RSP.25		1	1	3.0	2.5	7.5
7	Kurangnya ketahanan daerah terhadap bencana	RSP.25		1	1	3.4	2.8	9.52
8	Penurunan kualitas lingkungan hidup dan ancaman perubahan iklim	RSP.25		1	1	3.5	2.8	9.8
9	Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar	RSP.25		1	1	3.3	2.7	8.91
10	Adanya Aduan berulang terhadap pelayanan publik di Kabupaten Banyumas	RSP.25		1	1	3.0	2.8	8.4
11	Peningkatan jumlah kelahiran penduduk yang tinggi	RSP.25		1	1	3.1	2.9	8.99
12	Urbanisasi penduduk (desa ke kota) tinggi	RSP.25		1	1	3.0	2.8	8.4
13	Kurangnya pemanfaatan perpustakaan	RSP.25		1	1	2.8	3.0	8.4
14	Ekonomi Kreatif tidak berkembang	RSP.25		1	1	3.3	2.7	8.91
15	Kontribusi pariwisata terhadap PAD masih rendah	RSP.25		1	1	3.4	2.9	9.86
16	Kurangnya daya saing usaha mikro	RSP.25		1	1	3.4	2.8	9.52
17	Nilai tambah produk unggulan sektor pertanian tidak meningkat	RSP.25		1	1	3.2	2.6	8.32
18	Rendahnya minat investor yang berinvestasi	RSP.25		1	1	3.5	2.9	10.15
19	Menurunnya fungsi infrastruktur jaringan jalan dan irigasi	RSP.25		1	1	3.2	3.1	9.92
20	Pemanfaatan layanan Instalasi Pengolahan lumpur tinja (IPLT) belum optimal	RSP.25		1	1	2.9	2.6	7.54
21	Pemanfaatan transportasi umum belum optimal	RSP.25		1	1	2.9	2.8	8.12
22	Penurunan Daya dukung pangan	RSP.25		1	1	3.4	2.6	8.84
23	Masih adanya desa rawan pangan	RSP.25		1	1	3.2	2.5	8
24	Konsumsi pangan belum ideal	RSP.25		1	1	2.9	2.4	6.96
25	Masih tingginya persepsi korupsi	RSP.25		1	1	3.4	2.6	8.84

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
26	Perencanaan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja organisasi yang menjadi dasar penentuan reward	RSP.25		1	1	3.1	2.6	8.06
27	Perencanaan dan pengendalian yang diterapkan belum berbasis risiko	RSP.25		1	1	3.1	2.6	8.06
28	Kinerja individu dan OPD belum mendukung Tujuan Reformasi Birokrasi Pemkab	RSP.25		1	1	3.0	2.4	7.2
29	kurangnya standar pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan	RSP.25		1	1	3.2	2.7	8.64
30	Masih rendahnya tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	RSP.25		1	1	2.8	2.5	7
31	Pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan Pemkab	RSP.25		1	1	3.0	2.6	7.8
32	Penyelenggaraan pemerintah belum sepenuhnya terintegrasi, tersistematis dan terpadu dalam memanfaatkan TIK	RSP.25		1	1	3.1	2.7	8.37
33	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk pelaksanaan pembangunan	RSP.25		1	1	3.1	2.5	7.75
34	Masih lemahnya tingkat kemandirian fiskal daerah	RSP.25		1	1	3.3	2.6	8.58
35	Kurang berkembangnya potensi pemuda	RSP.25		1	1	3.1	2.9	8.99
36	Belum semua masyarakat miskin terintervensi bantuan	RSP.25		1	1	3.2	3.1	9.92
37	Masyarakat miskin tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatan	RSP.25		1	1	3.4	3.2	10.88
38	Masih banyaknya angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan	RSP.25		1	1	3.3	3.0	9.9
39	Masih banyaknya angkatan kerja dengan pendidikan rendah	RSP.25		1	1	3.3	2.7	8.91
40	Layanan pendidikan belum sesuai standar	RSP.25		1	1	3.1	2.4	7.44
41	Warga Usia Sekolah Tidak Bersekolah	RSP.25		1	1	3.3	2.5	8.25
42	Kualitas riset daerah masih rendah	RSP.25		1	1	3.1	2.7	8.37

Sumber: Aplikasi MRI 2025

HASIL KUESIONER SKALA DAMPAK

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Dampak																													Skor Skala Rata-rata	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1	Konsumsi pangan belum ideal	RSP.25		1	1	1	3	4	3	3	5	2	4	2	4	1	5	3	3	4	2	1	3	4	3	2	3	1	4	1	4	4	2	3	2.9
2	Nilai tambah produk unggulan sektor pertanian tidak meningkat	RSP.25		1	1	1	3	4	3	4	5	1	4	2	4	1	5	4	4	4	3	1	4	4	4	3	4	2	4	1	4	5	1	3	3.17
3	Kontribusi pariwisata terhadap PAD masih rendah	RSP.25		1	1	1	4	4	4	4	5	1	4	2	5	1	5	3	4	3	3	2	5	4	3	3	4	5	5	1	4	5	1	3	3.38
4	Kurangnya daya saing usaha mikro	RSP.25		1	1	1	3	4	3	4	5	2	3	2	5	3	5	4	4	3	3	2	4	4	4	3	4	4	5	1	4	5	2	3	3.41
5	Ekonomi Kreatif tidak berkembang	RSP.25		1	1	1	3	4	3	3	5	1	3	2	5	4	5	4	3	3	3	2	3	4	4	3	4	3	5	1	4	5	2	3	3.28
6	Rendahnya minat investor yang berinvestasi	RSP.25		1	1	1	4	4	4	3	5	1	4	2	5	3	5	4	3	5	3	2	4	4	4	3	4	5	5	1	5	4	1	3	3.48
7	Peningkatan jumlah kelahiran penduduk yang tinggi	RSP.25		1	1	1	3	4	2	4	5	1	5	2	3	1	4	2	3	4	3	2	5	4	4	2	2	4	5	1	4	5	3	3	3.14
8	Urbanisasi penduduk (desa ke kota) tinggi	RSP.25		1	1	1	2	4	3	2	5	1	4	2	3	1	4	2	2	3	4	2	5	4	4	2	2	5	5	1	4	5	3	3	3.03
9	Belum semua masyarakat miskin terintervensi bantuan	RSP.25		1	1	1	3	4	3	4	4	1	4	2	4	2	4	3	4	4	4	2	4	4	4	3	3	1	5	1	4	5	2	3	3.17
10	Masyarakat miskin tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatan	RSP.25		1	1	1	3	4	2	4	5	2	4	2	5	3	4	3	3	4	3	2	4	4	5	3	3	3	5	1	5	4	3	4	3.38
11	Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar	RSP.25		1	1	1	4	4	3	4	5	1	4	2	5	2	4	3	3	5	3	2	3	4	4	3	3	1	5	1	5	5	3	4	3.31
12	Warga Usia Sekolah Tidak Bersekolah	RSP.25		1	1	1	4	4	4	4	5	1	4	2	5	1	5	3	2	4	4	2	4	4	4	2	3	2	5	1	5	5	3	4	3.34
13	Layanan pendidikan belum sesuai standar	RSP.25		1	1	1	3	4	2	4	5	1	4	2	4	2	5	3	3	4	4	2	4	4	4	1	2	2	5	1	5	4	2	3	3.1
14	Kualitas riset daerah masih rendah	RSP.25		1	1	1	3	4	3	3	4	1	3	2	4	3	5	3	3	3	3	2	2	3	4	3	3	5	4	1	4	5	2	3	3.07
15	Penurunan kualitas lingkungan hidup dan ancaman perubahan iklim	RSP.25		1	1	1	4	4	4	5	5	1	5	2	4	2	5	3	2	3	3	2	4	4	5	2	4	5	5	1	5	5	3	3	3.48
16	Kurangnya ketahanan daerah terhadap bencana	RSP.25		1	1	1	4	4	4	4	5	1	4	2	5	2	4	4	2	4	3	2	4	4	4	2	5	4	5	1	5	4	3	4	3.45
17	Masih banyaknya angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan	RSP.25		1	1	1	3	4	4	4	5	1	3	2	5	2	4	3	3	4	3	2	5	4	4	3	5	1	5	1	4	5	2	3	3.28
18	Masih adanya desa rawan pangan	RSP.25		1	1	1	3	4	4	5	5	1	4	2	4	2	4	2	2	4	3	2	3	4	4	3	5	1	5	1	4	5	3	3	3.21
19	Penurunan Daya dukung pangan	RSP.25		1	1	1	3	4	3	5	5	1	4	2	5	3	4	2	3	4	4	2	4	4	4	3	4	4	5	1	4	4	3	3	3.38
20	kesenjangan tingkat pendidikan antar gender masih tinggi	RSP.25		1	1	1	2	4	4	3	4	1	3	2	3	2	4	3	2	4	3	2	2	3	3	2	2	3	5	1	3	4	2	3	2.76

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Dampak																									Skor Skala Rata-rata						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29		
21	Belum terpenuhinya hak-hak anak dalam keluarga	RSP.25		1	1	1	1	3	4	3	4	5	1	3	2	4	2	4	3	2	4	3	2	4	3	4	2	2	3	5	1	3	4	3	3	3
22	Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan hak perlindungan khusus bagi anak berhadapan hukum di Kabupaten Banyumas belum optimal	RSP.25		1	1	1	3	4	3	4	4	1	4	2	4	2	4	3	2	3	3	2	3	3	4	2	2	1	5	1	3	5	3	3	3	2.9
23	Pemanfaatan transportasi umum belum optimal	RSP.25		1	1	1	2	4	3	3	4	1	3	2	4	2	4	4	3	3	2	2	4	3	4	3	2	4	5	1	3	4	1	3	3	2.9
24	Pemanfaatan layanan Instalasi Pengolahan lumpur tinja (IPLT) belum optimal	RSP.25		1	1	1	2	4	3	3	5	1	3	2	4	2	4	3	2	3	2	2	4	3	3	3	3	2	5	1	4	4	3	3	3	2.9
25	Menurunnya fungsi infrastruktur jaringan jalan dan irigasi	RSP.25		1	1	1	3	4	3	4	5	1	4	2	5	2	5	3	2	4	3	2	4	4	4	3	4	3	5	1	4	4	2	3	3	3.24
26	Kurang berkembangnya potensi pemuda	RSP.25		1	1	1	4	4	3	3	4	1	3	2	5	3	4	3	2	4	2	2	4	4	4	2	5	3	4	1	3	4	2	4	4	3.1
27	Kurangnya pemanfaatan perpustakaan	RSP.25		1	1	1	2	4	3	3	5	1	3	2	4	1	4	3	2	3	2	2	3	3	3	2	5	2	4	1	3	4	1	4	4	2.76
28	Adanya Aduan berulang terhadap pelayanan publik di Kabupaten Banyumas	RSP.25		1	1	1	3	4	3	3	4	1	3	2	2	1	4	3	2	4	2	2	4	4	4	3	4	5	5	1	3	4	3	3	3	3
29	Adanya kesenjangan kompetensi ASN	RSP.25		1	1	1	2	4	3	4	5	1	3	2	3	1	4	3	2	3	3	2	4	4	4	3	5	5	4	1	3	4	3	3	3	3.07
30	Perencanaan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja organisasi yang menjadi dasar penentuan reward	RSP.25		1	1	1	4	4	3	4	5	1	3	2	5	1	5	3	2	4	3	2	4	4	4	2	2	4	4	1	3	5	1	3	3	3.07
31	Pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan Pemkab	RSP.25		1	1	1	3	4	3	4	4	1	4	2	4	2	5	3	3	4	3	2	4	4	3	3	2	2	5	1	3	4	2	3	3	3.03
32	Penyelenggaraan pemerintah belum sepenuhnya terintegrasi, tersistematis dan terpadu dalam memanfaatkan TIK	RSP.25		1	1	1	3	4	3	3	4	1	4	2	4	2	5	3	3	4	3	2	4	3	3	3	2	5	4	1	4	4	2	3	3	3.07
33	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk pelaksanaan pembangunan	RSP.25		1	1	1	3	4	3	4	5	1	4	2	4	1	5	3	2	4	4	2	4	4	3	3	2	2	5	1	5	4	3	3	3	3.14
34	Masih lemahnya tingkat kemandirian fiskal daerah	RSP.25		1	1	1	3	4	3	4	5	1	3	2	4	1	5	3	3	4	3	2	5	4	4	3	3	4	5	1	4	5	3	3	3	3.28
35	Terjadinya gangguan tantribum	RSP.25		1	1	1	3	4	3	4	5	1	3	2	4	2	4	3	2	3	3	2	4	3	4	2	4	2	5	1	5	5	1	3	3	3.03
36	Masih banyaknya angkatan kerja dengan pendidikan rendah	RSP.25		1	1	1	2	4	3	4	5	1	3	2	5	3	4	3	2	3	4	2	4	4	4	3	5	5	5	1	4	4	3	3	3	3.31

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Dampak																									Skor Skala Rata-rata					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	
37	Perencanaan dan pengendalian yang diterapkan belum berbasis risiko	RSP.25		1	1	1	3	4	3	4	5	1	3	2	4	4	5	3	2	3	2	2	5	4	4	2	2	2	5	1	4	4	3	3	3.1
38	Masih tingginya persepsi korupsi	RSP.25		1	1	1	4	4	3	5	5	1	4	2	5	4	5	3	2	5	3	2	5	4	4	3	3	2	5	1	5	4	3	3	3.45
39	Kinerja individu dan OPD belum mendukung Tujuan Reformasi Birokrasi Pemkab	RSP.25		1	1	1	3	4	3	4	4	1	3	2	3	4	4	3	2	4	2	2	4	3	4	3	2	2	5	1	4	5	3	3	3.03
40	Kinerja ASN belum sepenuhnya mendukung kinerja organisasi	RSP.25		1	1	1	3	4	3	4	5	2	3	2	4	4	4	3	2	4	3	2	4	3	4	3	2	1	5	1	3	5	3	3	3.1
41	Masih rendahnya tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	RSP.25		1	1	1	2	4	3	4	4	1	3	2	3	3	4	3	2	4	3	2	4	3	3	2	3	1	4	1	3	5	2	3	2.83
42	kurangnya standar pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan	RSP.25		1	1	1	3	4	3	4	5	1	3	2	5	4	4	3	2	3	4	2	4	3	4	3	3	2	5	1	4	4	3	3	3.17

Catatan Kode Skala:

- | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Satpol PP | 11. Dinperkim | 21. BPBD |
| 2. BKAD | 12. Dinarpusda | 22. DPPKBP3A |
| 3. Dinkominfo | 13. Dinperindag | 23. DPMPTSP |
| 4. Dinakerkop UKM | 14. Inspektorat | 24. BKPSDM |
| 5. Dinperten KP | 15. RSUD Banyumas | 25. Dindik |
| 6. Dinkes | 16. Dinsospermasdes | 26. DLH |
| 7. Dinkannak | 17. Dinporabudpar | 27. Kesbangpol |
| 8. Bapenda | 18. Dindukcapil | 28. RSUD Ajibarang |
| 9. Dinhub | 19. Setda | 29. Setwan |
| 10. DPU | 20. Bappedalitbang | |

HASIL KUISIONER SKALA KEMUNGKINAN

Form 4 Skala Kemungkinan

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Dampak																													Skor Skala Rata-rata
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Konsumsi pangan belum ideal	RSP.25	1	1	1	1	3	1	3	1	1	4	4	2	3	3	1	2	2	2	2	1	3	3	1	4	3	5	1	4	2	4	3	2.41
2	Nilai tambah produk unggulan sektor pertanian tidak meningkat	RSP.25	1	1	1	1	3	1	2	2	1	3	5	3	2	3	2	3	2	3	1	2	3	3	2	4	2	5	1	4	3	4	4	2.59
3	Kontribusi pariwisata terhadap PAD masih rendah	RSP.25	1	1	1	1	3	1	3	2	1	3	3	3	2	3	2	4	5	3	1	1	5	3	2	5	3	5	1	5	3	4	5	2.86
4	Kurangnya daya saing usaha mikro	RSP.25	1	1	1	1	3	1	3	3	1	3	4	3	2	3	1	4	3	3	2	3	4	3	1	4	3	5	2	4	3	4	5	2.83
5	Ekonomi Kreatif tidak berkembang	RSP.25	1	1	1	1	3	1	3	1	1	3	4	3	2	3	1	4	4	3	2	3	4	3	1	4	2	5	1	4	4	4	4	2.72
6	Rendahnya minat investor yang berinvestasi	RSP.25	1	1	1	2	3	1	2	1	1	4	3	3	2	3	2	3	3	3	2	4	4	4	1	5	3	5	1	5	4	4	4	2.86
7	Peningkatan jumlah kelahiran penduduk yang tinggi	RSP.25	1	1	1	2	3	1	4	2	1	3	4	3	3	3	2	4	3	3	3	1	5	4	1	5	4	5	1	5	4	3	1	2.9
8	Urbanisasi penduduk (desa ke kota) tinggi	RSP.25	1	1	1	2	3	1	5	3	2	4	3	3	3	3	1	3	2	2	3	3	4	3	1	5	4	5	1	5	3	2	1	2.79
9	Belum semua masyarakat miskin terintervensi bantuan	RSP.25	1	1	1	2	3	1	4	3	4	5	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3	5	4	1	5	4	5	1	4	3	4	3	3.07
10	Masyarakat miskin tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatan	RSP.25	1	1	1	2	3	1	4	3	4	4	5	4	3	3	2	4	2	3	2	2	4	4	2	5	4	5	1	4	5	4	3	3.21
11	Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar	RSP.25	1	1	1	2	3	1	3	1	2	4	4	3	2	3	2	4	2	2	2	1	3	5	1	5	4	5	1	3	5	3	2	2.72
12	Warga Usia Sekolah Tidak Bersekolah	RSP.25	1	1	1	2	3	1	4	1	1	1	3	3	2	3	2	3	2	3	1	2	1	5	1	4	3	4	1	4	5	3	3	2.48
13	Layanan pendidikan belum sesuai standar	RSP.25	1	1	1	1	2	1	3	3	1	3	3	3	1	3	1	3	2	2	1	2	2	4	1	5	3	5	1	4	4	3	2	2.41
14	Kualitas riset daerah masih rendah	RSP.25	1	1	1	1	3	1	3	2	1	3	4	2	2	3	1	5	3	3	1	1	5	5	1	5	3	5	1	4	3	3	4	2.72
15	Penurunan kualitas lingkungan hidup dan ancaman perubahan iklim	RSP.25	1	1	1	2	3	1	3	3	1	4	5	3	2	3	2	4	5	2	1	1	3	5	1	4	3	5	1	4	3	2	4	2.79

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Dampak																									Skor Skala Rata-rata					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	
16	Kurangnya ketahanan daerah terhadap bencana	RSP.25		1	1	1	1	2	1	3	3	1	4	5	3	2	3	2	4	4	2	1	2	4	5	1	5	3	5	1	4	3	2	4	2.79
17	Masih banyaknya angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan	RSP.25		1	1	1	2	4	1	4	3	2	4	4	3	4	3	1	4	2	3	1	1	5	5	1	5	3	5	1	4	4	3	4	3
18	Masih adanya desa rawan pangan	RSP.25		1	1	1	1	2	1	3	2	1	3	4	3	4	3	2	3	2	2	1	1	3	5	1	5	3	4	1	4	3	2	3	2.52
19	Penurunan Daya dukung pangan	RSP.25		1	1	1	1	2	1	2	1	2	3	4	3	3	3	1	3	2	2	1	2	5	5	1	5	3	5	1	4	4	2	3	2.59
20	kesenjangan tingkat pendidikan antar gender masih tinggi	RSP.25		1	1	1	1	3	1	2	3	2	3	4	2	3	3	2	3	2	2	1	2	2	5	1	5	2	5	1	4	3	2	1	2.45
21	Belum terpenuhinya hak-hak anak dalam keluarga	RSP.25		1	1	1	1	3	1	2	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2	1	2	2	5	1	4	2	5	1	4	4	2	1	2.41
22	Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan hak perlindungan khusus bagi anak berhadapan hukum di Kabupaten Banyumas belum optimal	RSP.25		1	1	1	2	3	1		2	1	3	4	3	2	3	1	3	2	3	1	1	3	5	1	4	2	5	1	4	4	2	1	2.34
23	Pemanfaatan transportasi umum belum optimal	RSP.25		1	1	1	1	4	1	3	3	1	4	3	4	2	3	2	4	3	3	1	2	5	4	1	5	2	5	1	4	4	3	3	2.83
24	Pemanfaatan layanan Instalasi Pengolahan lumpur tinja (IPLT) belum optimal	RSP.25		1	1	1	2	3	1	2	1	1	3	3	4	4	3	1	4	2	3	1	2	3	4	1	5	3	5	1	4	3	2	3	2.59
25	Menurunnya fungsi infrastruktur jaringan jalan dan irigasi	RSP.25		1	1	1	2	4	1	4	3	1	5	4	3	3	3	2	4	4	3	1	3	4	4	1	5	3	5	1	4	4	3	4	3.07
26	Kurang berkembangnya potensi pemuda	RSP.25		1	1	1	1	3	1	4	2	1	4	4	3	3	3	2	4	4	3	1	3	4	4	1	4	3	5	1	4	3	3	4	2.86
27	Kurangnya pemanfaatan perpustakaan	RSP.25		1	1	1	1	3	1	3	3	1	4	4	4	3	3	2	4	3	3	1	2	5	5	1	5	4	5	1	5	3	2	4	2.97
28	Adanya Aduan berulang terhadap pelayanan publik di Kabupaten Banyumas	RSP.25		1	1	1	2	3	1	4	3	1	5	4	3	3	3	1	4	2	3	1	1	3	5	1	5	3	5	1	4	3	2	4	2.79
29	Adanya kesenjangan kompetensi ASN	RSP.25		1	1	1	1	3	1	3	1	1	5	5	3	3	3	2	4	2	3	1	4	4	5	1	4	3	5	1	4	3	2	3	2.79

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Dampak																									Skor Skala Rata-rata					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	
30	Perencanaan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja organisasi yang menjadi dasar penentuan reward	RSP.25		1	1	1	2	3	1	1	1	1	4	5	3	3	3	2	4	2	2	2	2	3	5	1	5	3	5	1	4	2	2	3	2.62
31	Pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan Pemkab	RSP.25		1	1	1	2	2	1	2	2	1	4	4	3	3	3	2	4	2	2	2	3	3	4	1	5	2	5	1	4	3	2	3	2.62
32	Penyelenggaraan pemerintah belum sepenuhnya terintegrasi, tersistematis dan terpadu dalam memanfaatkan TIK	RSP.25		1	1	1	2	3	1	2	3	1	3	4	3	3	3	2	4	2	1	2	5	4	4	1	5	2	4	1	4	3	2	3	2.69
33	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk pelaksanaan pembangunan	RSP.25		1	1	1	1	3	1	2	1	1	3	4	3	3	3	1	4	2	2	2	3	3	4	1	5	2	4	1	4	4	2	2	2.48
34	Masih lemahnya tingkat kemandirian fiskal daerah	RSP.25		1	1	1	1	3	1	2	3	1	3	4	3	3	3	2	3	2	2	1	1	4	3	1	5	3	5	1	4	3	3	4	2.59
35	Terjadinya gangguan tantribum	RSP.25		1	1	1	2	2	1	4	2	1	3	4	3	2	3	1	3	2	2	2	2	3	3	1	5	2	5	1	4	3	2	4	2.52
36	Masih banyaknya angkatan kerja dengan pendidikan rendah	RSP.25		1	1	1	2	3	1	4	3	1	3	4	3	3	2	2	4	2	3	1	1	3	3	1	5	3	5	2	4	4	2	3	2.69
37	Perencanaan dan pengendalian yang diterapkan belum berbasis risiko	RSP.25		1	1	1	2	2	1	3	3	1	4	5	3	3	3	1	2	2	2	1	2	4	3	1	5	3	5	1	4	3	3	2	2.59
38	Masih tingginya persepsi korupsi	RSP.25		1	1	1	2	3	1	2	3	1	3	5	3	2	4	2	3	2	2	3	2	3	4	1	5	2	5	1	4	3	2	2	2.62
39	Kinerja individu dan OPD belum mendukung Tujuan Reformasi Birokrasi Pemkab	RSP.25		1	1	1	1	3	1	3	1	1	3	4	3	2	3	2	3	1	2	1	3	4	4	1	5	2	5	1	4	3	2	2	2.45
40	Kinerja ASN belum sepenuhnya mendukung kinerja organisasi	RSP.25		1	1	1	1	3	1	4	1	1	3	3	3	2	4	1	3	1	3	1	4	4	4	2	5	2	5	2	4	3	2	2	2.59

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Dampak																									Skor Skala Rata-rata					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	
41	Masih rendahnya tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	RSP.25		1	1	1	1	3	1	3	3	1	3	3	3	2	3	1	3	1	2	3	1	4	4	2	5	2	5	1	4	4	2	2	2.52
42	kurangnya standar pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan	RSP.25		1	1	1	1	2	1	3	1	1	3	3	4	2	3	1	4	2	2	3	4	3	4	2	5	4	5	1	4	4	2	2	2.66

Sumber: Aplikasi MRI 2025

Catatan Kode Skala:

- | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Dinporabudpar | 11. Setda | 21. Dinhub |
| 2. Dinkes | 12. Setwan | 22. Kesbangpol |
| 3. Dinkominfo | 13. Dinperindag | 23. Bappedalitbang |
| 4. Satpol PP | 14. RSUD Banyumas | 24. BKPSDM |
| 5. Dinakerkop UKM | 15. BKAD | 25. Dinkannak |
| 6. RSUD Ajibarang | 16. BPBD | 26. Dinarpusda |
| 7. Dindik | 17. Dinperkim | 27. Bapenda |
| 8. DPU | 18. DPMPTSP | 28. Inspektorat |
| 9. Dinperten KP | 19. Dindukcapil | 29. DPPKBP3A |
| 10. Dinsospermasdes | 20. DLH | |

**FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode Yang dinilai	: Periode RPD Tahun 2024-2026		
Sumber Data	: RPD 2024-2026		
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1	Memperkuat Ketahanan Pangan	
	Tujuan 2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM	
	Tujuan 3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	
	Tujuan 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing	

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Adanya kesenjangan kompetensi ASN	RSP.25		1 1	8.68	PEMKAB BANYUMAS	Pengembangan kompetensi ASN (pengetahuan, ketrampilan, sikap) belum intensif	1. Kinerja pemkab tidak tercapai; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap Layanan pemerintah daerah; 3. Karir ASN tidak berkembang.
2	Kinerja ASN belum sepenuhnya mendukung kinerja organisasi	RSP.25		1 1	8.06	PEMKAB BANYUMAS	kebijakan pengelolaan/ manajemen ASN di Pemkab Banyumas belum terimplementasi dengan baik	1. Kinerja pemkab tidak tercapai; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap Layanan pemerintah daerah
3	Belum terpenuhinya hak-hak anak dalam keluarga	RSP.25		1 1	7.2	PEMKAB BANYUMAS	Kurangnya kualitas keluarga (ketentraman, kemandirian, kebahagiaan)	1. Terganggunya Psikologis anak yang kurang baik; 2. Rendahnya kesejahteraan keluarga; 3. Timbulnya reputasi Kabupaten Banyumas tidak layak anak
4	Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan hak perlindungan khusus bagi anak berhadapan hukum di Kabupaten Banyumas belum optimal	RSP.25		1 1	6.67	PEMKAB BANYUMAS	Belum adanya regulasi khusus terkait pelaksanaan KLA	1. Timbulnya reputasi Kabupaten Banyumas tidak layak anak; 2. Tidak terpenuhinya hak anak/ tidak terlindungi
							Belum tersedianya fasilitas pusat rehabilitasi shelter, LPKA, dan BLK;	1. Timbulnya reputasi Kabupaten Banyumas tidak layak anak; 2. Tidak terpenuhinya hak anak/ tidak terlindungi
							Belum tersusunnya RAD terkait Kabupaten Layak Anak	1. Timbulnya reputasi Kabupaten Banyumas tidak layak anak; 2. Tidak terpenuhinya hak anak/ tidak terlindungi
							Komunikasi informasi kebijakan KLA masih kurang jelas dan mendetail	1. Timbulnya reputasi Kabupaten Banyumas tidak layak anak; 2. Tidak terpenuhinya hak anak/ tidak terlindungi

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
					Tumpang tindih kewenangan antara Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan dan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT - PKBGA) dan pekerja sosial;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Timbulnya reputasi Kabupaten Banyumas tidak layak anak; 2. Tidak terpenuhinya hak anak/ tidak terlindungi 	
5	kesenjangan tingkat pendidikan antar gender masih tinggi	RSP.25	1 1	6.72	PEMKAB BANYUMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. masih rendahnya pemberdayaan terhadap perempuan; 2. masih rendahnya akses pendidikan untuk perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan perempuan masih rendah; 2. Tingkat ekonomi perempuan masih rendah; 3. tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah; 4. Rendahnya kualitas keluarga; 5. Pembangunan belum responsif gender
6	Terjadinya gangguan tantribum	RSP.25	1 1	7.5	PEMKAB BANYUMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ipoleksosbudhankam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terganggunya rasa aman Masyarakat; 2. Berkurangnya stabilitas daerah yang berdampak pada seluruh sektor pembangunan
						Kurangnya efektivitas peran Formkompimda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terganggunya rasa aman Masyarakat; 2. Berkurangnya stabilitas daerah yang berdampak pada seluruh sektor pembangunan
7	Kurangnya ketahanan daerah terhadap bencana	RSP.25	1 1	9.52	PEMKAB BANYUMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran Forum Pengurangan Risiko Bencana di beberapa wilayah tertentu; 2. Belum adanya Rencana Kontijensi Bencana untuk semua jenis bencana; 3. Kurangnya ketersediaan Early Warning System. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kerugian (gangguan ekonomi, kesehatan, kehilangan nyawa, terhambat aktivitas, kerusakan bangunan, dll) masyarakat akibat bencana; 2. Tidak tercapainya kinerja pemerintah dalam penanggulangan bencana; 3. Meningkatnya kerusakan lingkungan
8	Penurunan kualitas lingkungan hidup dan ancaman perubahan iklim	RSP.25	1 1	9.8	PEMKAB BANYUMAS	Terjadinya pencemaran lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup; 2. Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat; 3. Tidak tercapainya Kinerja Pemkab terkait pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
						Penurunan daya dukung air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup; 2. Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat; 3. Tidak tercapainya Kinerja Pemkab terkait pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
						Meningkatnya emisi gas rumah kaca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup; 2. Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat; 3. Tidak tercapainya Kinerja Pemkab terkait pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
								Belum ada kebijakan terkait rencana induk RTH Publik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup; 2. Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat; 3. Tidak tercapainya Kinerja Pemkab terkait pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
9	Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar	RSP.25		1	1	8.91	PEMKAB BANYUMAS	Tidak terpantaunya sasaran yang seharusnya menerima pelayanan kesehatan dasar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya masyarakat yang menderita penyakit; 2. Rendahnya kualitas kesehatan Keluarga Kab Banyumas; 3. Tingginya kematian pada ibu dan bayi; 4. Menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah kabupaten banyumas
10	Adanya Aduan berulang terhadap pelayanan publik di Kabupaten Banyumas	RSP.25		1	1	8.4	PEMKAB BANYUMAS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Aduan tidak ditindaklanjuti dengan segera; 2. Pelayanan tidak sesuai dengan standar; 3. Kurang sinerginya Pelayanan Publik Lintas Perangkat Daerah/Instansi Vertikal 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; 2. Kinerja Pemkab dalam pelayanan publik menurun
11	Peningkatan jumlah kelahiran penduduk yang tinggi	RSP.25		1	1	8.99	PEMKAB BANYUMAS	Implementasi program pengendalian penduduk belum efektif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya stabilitas daerah; 2. Tingginya permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan; 3. Terhambatnya pencapaian tujuan pemkab; 4. Kesejahteraan/ Kualitas hidup masyarakat dalam keluarga rendah.
								Cara pandang/ keyakinan masyarakat "Banyak anak banyak rejeki"	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya stabilitas daerah; 2. Tingginya permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus diselesaikan pemerintah; 3. Terhambatnya pencapaian tujuan pemkab; 4. Kesejahteraan/ Kualitas hidup masyarakat dalam keluarga rendah.
								Banyaknya pernikahan usia muda	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya stabilitas daerah; 2. Tingginya permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus diselesaikan pemerintah; 3. Terhambatnya pencapaian tujuan pemkab; 4. Kesejahteraan/ Kualitas hidup masyarakat dalam keluarga rendah.
12	Urbanisasi penduduk (desa ke kota) tinggi	RSP.25		1	1	8.4	PEMKAB BANYUMAS	Peluang pekerjaan lebih banyak di perkotaan / peluang kehidupan yang lebih layak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ketidakseimbangan/ ketidakteraturan wilayah perkotaan dengan pedesaan (polusi udara, kemacetan, lingkungan kumuh, kriminalitas, dll); 2. Ketimpangan pendapatan, pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
							Sarana prasarana perkotaan yang lebih lengkap/ memadai;	1. Ketidakseimbangan/ ketidakteraturan wilayah perkotaan dengan pedesaan (polusi udara, kemacetan, lingkungan kumuh, kriminalitas, dll); 2. Ketimpangan pendapatan, pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya.	
13	Kurangnya pemanfaatan perpustakaan	RSP.25		1	1	8.4	PEMKAB BANYUMAS	Masih adanya perpustakaan yang belum berstandar	1. Rendahnya wawasan masyarakat; 2. Rendahnya kualitas SDM masyarakat; 3. Rendahnya capaian kinerja literasi Daerah Kab. Banyumas
14	Ekonomi Kreatif tidak berkembang	RSP.25		1	1	8.91	PEMKAB BANYUMAS	Belum adanya kebijakan strategi pengembangan ekonomi kreatif	1. Nilai PDRB tidak optimal; 2. Rendahnya pendapatan pelaku ekraf; 3. Produk ekraf tidak berkembang
15	Kontribusi pariwisata terhadap PAD masih rendah	RSP.25		1	1	9.86	PEMKAB BANYUMAS	1. Kurangnya daya tarik wisata; 2. Belum adanya Kebijakan Pengembangan Pariwisata	1. PDRB dan PAD tidak meningkat; 2. Rendahnya pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata
16	Kurangnya daya saing usaha mikro	RSP.25		1	1	9.52	PEMKAB BANYUMAS	1. Kurangnya akses permodalan; 2. kurangnya skill/kemampuan SDM pelaku usaha mikro	1. Menurunnya PDRB sektor industri dan perdagangan; 2. Rendahnya pendapatan pelaku usaha mikro; 3. Usaha mikro tidak berkembang; 4. Nilai ekspor tidak meningkat
								kurangnya kualitas produk usaha mikro	1. Menurunnya PDRB sektor industri dan perdagangan; 2. Rendahnya pendapatan pelaku usaha mikro; 3. Usaha mikro tidak berkembang; 4. Nilai ekspor tidak meningkat
17	Nilai tambah produk unggulan sektor pertanian tidak meningkat	RSP.25		1	1	8.32	PEMKAB BANYUMAS	1. Belum adanya kebijakan penetapan dan prioritas produk unggulan daerah di sektor pertanian; 2. Belum adanya Strategi pengembangan produk unggulan daerah di sektor pertanian.	1. Kinerja Pemkab dalam meningkatkan ekonomi daerah tidak tercapai; 2. Pendapatan masyarakat khususnya para petani tidak mengalami peningkatan
18	Rendahnya minat investor yang berinvestasi	RSP.25		1	1	10.15	PEMKAB BANYUMAS	1. Belum adanya kebijakan pemetaan wilayah investasi; 2. Masih rendahnya dukungan infrastruktur yang memadai untuk investasi; 3. RTRW atau tata ruang yang tidak sesuai dengan investasi yang ada; 4. Belum adanya kawasan industri.	1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah; 2. Rendahnya penyerapan tenaga kerja; 3. Rendahnya investor yang melakukan kesepakatan berinvestasi (Lol)

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
19	Menurunnya fungsi infrastruktur jaringan jalan dan irigasi	RSP.25		1	1	9.92	PEMKAB BANYUMAS	Penanganan infrastruktur belum sesuai prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya hasil Produksi pertanian karena tidak optimalnya fungsi jaringan irigasi; 2. terganggunya konektivitas antar wilayah
20	Pemanfaatan layanan Instalasi Pengolahan lumpur tinja (IPLT) belum optimal	RSP.25		1	1	7.54	PEMKAB BANYUMAS	Belum adanya kebijakan yang mengatur terkait pelayanan air limbah domestik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses air limbah yang aman rendah; 2. Terjadinya pencemaran lingkungan pada tempat tinggal masyarakat; 3. Terganggunya kualitas kesehatan masyarakat
								Tarif retribusi layanan IPLT belum memperhatikan kondisi objek retribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses air limbah yang aman rendah; 2. Terjadinya pencemaran lingkungan pada tempat tinggal masyarakat; 3. Terganggunya kualitas kesehatan masyarakat
								Kurangnya SDM pengelola IPLT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses air limbah yang aman rendah; 2. Terjadinya pencemaran lingkungan pada tempat tinggal masyarakat; 3. Terganggunya kualitas kesehatan masyarakat
								Kurangnya infrastruktur pengolahan lumpur tinja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses air limbah yang aman rendah; 2. Terjadinya pencemaran lingkungan pada tempat tinggal masyarakat; 3. Terganggunya kualitas kesehatan masyarakat
								Rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlunya pengolahan lumpur tinja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses air limbah yang aman rendah; 2. Terjadinya pencemaran lingkungan pada tempat tinggal masyarakat; 3. Terganggunya kualitas kesehatan masyarakat
21	Pemanfaatan transportasi umum belum optimal	RSP.25		1	1	8.12	PEMKAB BANYUMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan transportasi tidak sesuai kebutuhan; 2. Layanan transportasi belum terintegrasi; 3. Layanan transportasi kalah saing dengan moda transportasi privat atau pribadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemacetan; 2. Layanan transportasi kurang efektif; 3. Kurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum
22	Penurunan Daya dukung pangan	RSP.25		1	1	8.84	PEMKAB BANYUMAS	Terjadinya penurunan produktivitas lahan komoditas pangan pertanian dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam penyediaan pangan 2. Kebutuhan pangan masyarakat tidak terpenuhi
								<ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan pertanian secara terus-menerus; 2. Terjadinya wabah/ bencana pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam penyediaan pangan; 2. Kebutuhan pangan masyarakat tidak terpenuhi
23	Masih adanya desa rawan pangan	RSP.25		1	1	8	PEMKAB BANYUMAS	Kurangnya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup	Tidak terpenuhinya pangan masyarakat di beberapa wilayah

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
							<p>Kurangnya akses secara ekonomi bagi individu/ rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup</p> <p>Adanya bencana alam</p>	<p>Tidak terpenuhinya pangan masyarakat di beberapa wilayah</p> <p>Tidak terpenuhinya pangan masyarakat di beberapa wilayah</p>
24	Konsumsi pangan belum ideal	RSP.25		1 1	6.96	PEMKAB BANYUMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya penganekaragaman konsumsi dan olahan pangan masyarakat; 2. Kurangnya keamanan pangan ; 3. kurang efisiennya pemanfaatan pangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya konsumsi pangan yang tidak sehat (bergizi seimbang); 2. Meningkatnya risiko penyakit/ pertumbuhan kesehatan masyarakat yang kurang baik; 3. Tidak tercapainya kinerja pemerintah dalam pemanfaatan pangan yang ideal bagi masyarakat
25	Masih tingginya persepsi korupsi	RSP.25		1 1	8.84	PEMKAB BANYUMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengendalian terhadap Fraud dalam penyelenggaraan pemerintahan; 2. Kurangnya kapabilitas SDM dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap integritas pemkab 2. Profesionalitas ASN rendah dalam mendukung pencapaian tujuan Pemkab
26	Perencanaan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja organisasi yang menjadi dasar penentuan reward	RSP.25		1 1	8.06	PEMKAB BANYUMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada kebijakan yang mengatur pelaksanaan manajemen kinerja yang terintegrasi dari perencanaan sampai penilaian kinerja; 2. Masih belum efektifnya Implementasi Kebijakan Pemkab terkait Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja; 3. Kurangnya Partisipasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam pencapaian tujuan Pemkab; 4. Kebijakan reward dan punishment belum sepenuhnya mendasari pada perencanaan dan pengukuran kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pemerintah tidak akuntabel dan transparan; 2. Munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah; 3. Tujuan Pemerintah daerah tidak tercapai secara efektif dan efisien
27	Perencanaan dan pengendalian yang diterapkan belum berbasis risiko	RSP.25		1 1	8.06	PEMKAB BANYUMAS	Aturan yang dipedomani dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian dengan aturan yang dipedomani dalam pengelolaan risiko berbeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan pengendalian yang ada belum efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi; 2. Masyarakat tidak merasakan hasil pembangunan yang nyata

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
								<ol style="list-style-type: none"> 1. belum adanya kebijakan pedoman penyusunan perencanaan berbasis risiko; 2. kebijakan pengelolaan risiko belum mengakomodir kebijakan perencanaan; 3. sistem informasi perencanaan dan pengelolaan risiko belum terintegrasi sepenuhnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan pengendalian yang ada belum efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi; 2. Masyarakat tidak merasakan hasil pembangunan yang nyata
28	Kinerja individu dan OPD belum mendukung Tujuan Reformasi Birokrasi Pemkab	RSP.25		1	1	7.2	PEMKAB BANYUMAS	Kurangnya komitmen dan pemahaman semua Pimpinan OPD untuk mengimplementasikan kebijakan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan apartur yang berintegritas tinggi, produktif, dan pelayanan prima; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
29	kurangnya standar pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan	RSP.25		1	1	8.64	PEMKAB BANYUMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya mengatur standar pengadaan barang dan jasa secara tepat dan masih memberikan celah bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan kecurangan; 2. kualifikasi dan kompetensi SDM pengelola barang dan jasa (PBJ) masih kurang; 3. masih kurangnya pemanfaatan penggunaan sistem pengadaan (Non e-Tendering dan e-Purchasing, e-Kontrak); 4. Belum optimalnya tingkat kematangan UKPBJ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pertukaran kepentingan pemangku kepentingan pengadaan/ terjadinya penyimpangan; 2. Belum optimalnya penilaian Monitoring Center Prevention (MCP) oleh KPK; 3. Tidak terwujudnya reformasi birokrasi / tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adaptif, transparan, akuntabel; 4. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
30	Masih rendahnya tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	RSP.25		1	1	7	PEMKAB BANYUMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada kebijakan yang mengatur tata kelola pemerintahan secara menyeluruh; 2. Kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD, dan Kepala Daerah belum sesuai; 3. Masih rendahnya keterlibatan pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan; 4. Masih rendahnya Kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pembangunan kurang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat; 2. Tidak terwujudnya Birokrasi yang kapabel; 3. Rendahnya kualitas reformasi hukum pemerintah daerah

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
31	Pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan Pemkab	RSP.25		1 1	7.8	PEMKAB BANYUMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kebijakan pedoman penyusunan perencanaan berbasis risiko atau kebijakan pengelolaan risiko belum mengakomodir kebijakan perencanaan; 2. Sistem informasi perencanaan dan pengelolaan risiko belum terintegrasi sepenuhnya; 3. Kualitas pengelolaan risiko dan RTP belum optimal; 4. kualitas SDM terhadap pengelolaan risiko secara substansi dan teknis masih kurang; 5. kualitas penetapan tujuan belum optimal; 6. Masih adanya temuan berulang terkait keuangan, aset, maupun ketaatan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan pemerintah banyumas tidak tercapai secara efektif dan efisien; 2. Identifikasi risiko tidak tepat dan Rencana tindak pengendalian (RTP) terhadap risiko kurang relevan; 3. Hasil pembangunan tidak dirasakan secara nyata oleh masyarakat
32	Penyelenggaraan pemerintah belum sepenuhnya terintegrasi, tersistematis dan terpadu dalam memanfaatkan TIK	RSP.25		1 1	8.37	PEMKAB BANYUMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kebijakan terkait arah dan langkah pelaksanaan SPBE yang terintegrasi; 2. Belum adanya kebijakan pelaksanaan manajemen risiko SPBE yang terintegrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel tidak terwujud; 2. Rendahnya kualitas pelayanan publik; 3. Meningkatkan beban anggaran; 4. Rendahnya kepuasan masyarakat; 5. Tingginya risiko terhadap sistem keamanan informasi
33	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk pelaksanaan pembangunan	RSP.25		1 1	7.75	PEMKAB BANYUMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya strategi pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset daerah; 2. Masih rendahnya SDM pengelola keuangan dan aset daerah 	Menurunnya akuntabilitas laporan keuangan daerah
34	Masih lemahnya tingkat kemandirian fiskal daerah	RSP.25		1 1	8.58	PEMKAB BANYUMAS	Belum adanya strategi peningkatan pendapatan daerah	Pembangunan tidak terealisasi sesuai perencanaan
35	Kurang berkembangnya potensi pemuda	RSP.25		1 1	8.99	PEMKAB BANYUMAS	kurangnya strategi dan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam pemajuan pembangunan kepemudaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat produktivitas pemuda; 2. Meningkatnya jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas (khususnya pemuda); 3. Menurunnya prestasi pemuda.
							<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya ketertarikan dan kompetensi pemuda terhadap kewirausahaan dan olahraga; 2. Kurangnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat produktivitas pemuda; 2. Meningkatnya jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas (khususnya pemuda); 3. Menurunnya prestasi pemuda.

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
36	Belum semua masyarakat miskin terintervensi bantuan	RSP.25		1 1	9.92	PEMKAB BANYUMAS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya prioritas sasaran penerima bantuan sesuai kebutuhan; 2. Kurangnya kolaborasi antar stakeholder dalam pemberian bantuan; 3. belum adanya strategi yang efektif dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam penanganan kemiskinan; 2. Tingginya angka kemiskinan; 3. Rendahnya kualitas hidup masyarakat;
37	Masyarakat miskin tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatan	RSP.25		1 1	10.88	PEMKAB BANYUMAS	Rendahnya motivasi warga miskin dalam berusaha	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tingginya angka pengangguran; 2. Rendahnya upah yang diperoleh warga miskin; 3. Tingginya angka kemiskinan; 4. Rendahnya kualitas hidup masyarakat miskin
							Rendahnya tingkat pendidikan warga miskin	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tingginya angka pengangguran; 2. Rendahnya upah yang diperoleh warga miskin; 3. Tingginya angka kemiskinan; 4. Rendahnya kualitas hidup masyarakat miskin
							Kurangnya peluang usaha yang tersedia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tingginya angka pengangguran; 2. Rendahnya upah yang diperoleh warga miskin; 3. Tingginya angka kemiskinan; 4. Rendahnya kualitas hidup masyarakat miskin
							Kurangnya fasilitasi bagi warga miskin untuk meningkatkan kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tingginya angka pengangguran; 2. Rendahnya upah yang diperoleh warga miskin; 3. Tingginya angka kemiskinan; 4. Rendahnya kualitas hidup masyarakat miskin
38	Masih banyaknya angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan	RSP.25		1 1	9.9	PEMKAB BANYUMAS	Rendahnya UMK Banyumas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan angka pengangguran Kabupaten Banyumas; 2. Meningkatkan angka kemiskinan; 3. Masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan
							ketidaksiesuaian kompetensi yang dimiliki dengan yang dibutuhkan dalam pasar kerja;	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan angka pengangguran Kabupaten Banyumas; 2. Meningkatkan angka kemiskinan; 3. Masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan
							kurang efektifnya strategi pemerintah dalam implementasi peningkatan kesempatan kerja;	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan angka pengangguran Kabupaten Banyumas; 2. Meningkatkan angka kemiskinan; 3. Masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak		
					Kurangnya jenis pelatihan yang dibutuhkan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan angka pengangguran Kabupaten Banyumas; 2. Meningkatkan angka kemiskinan; 3. Masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 		
					Masih rendahnya penerapan tata kelola ketenagakerjaan yang layak oleh perusahaan penyedia kerja;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan angka pengangguran Kabupaten Banyumas; 2. Meningkatkan angka kemiskinan; 3. Masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 		
39	Masih banyaknya angkatan kerja dengan pendidikan rendah	RSP.25	1	1	8.91	PEMKAB BANYUMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses pendidikan menengah dan tinggi yang sulit; 2. Keterbatasan angkatan kerja untuk mendapatkan pelatihan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya pengangguran terbuka; 2. Angkatan kerja kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang dibutuhkan pasar kerja; 3. Meningkatnya kesenjangan ekonomi masyarakat; 4. Rendahnya produktivitas dan rata-rata upah pekerja
							Ketidakmampuan kondisi ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya pengangguran terbuka; 2. Angkatan kerja kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang dibutuhkan pasar kerja; 3. Meningkatnya kesenjangan ekonomi masyarakat; 4. Rendahnya produktivitas dan rata-rata upah pekerja
40	Layanan pendidikan belum sesuai standar	RSP.25	1	1	7.44	PEMKAB BANYUMAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. belum meratanya pemenuhan sarana prasarana pada satuan pendidikan secara memadai; 2. belum meratanya pemenuhan SDM pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pendidikan masyarakat rendah; 2. Kualitas pendidikan masyarakat rendah
41	Warga Usia Sekolah Tidak Bersekolah	RSP.25	1	1	8.25	PEMKAB BANYUMAS	Kondisi Sosial Ekonomi Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pendidikan masyarakat rendah; 2. Kualitas pendidikan masyarakat rendah
42	Kualitas riset daerah masih rendah	RSP.25	1	1	8.37	PEMKAB BANYUMAS	kurangnya objek yang akan difasilitasi kekayaan intelektual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekosistem riset dan inovasi daerah rendah; 2. Pertumbuhan ekonomi lambat; 3. Budaya inovasi di masyarakat tidak berkembang
							<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya publikasi ilmiah; 2. belum diimplementasikannya kebijakan terkait riset dan inovasi; 3. Belanja riset masih rendah; 4. Masih rendahnya kualitas Pelaku/lembaga riset daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekosistem riset dan inovasi daerah rendah; 2. Pertumbuhan ekonomi lambat; 3. Budaya inovasi di masyarakat tidak berkembang

Sumber: Aplikasi MRI 2025

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada dan risiko prioritas sudah ditetapkan, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua bentuk pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati.

FORMULIR KERTAS KERJA

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: Tahun 2025
Tahun Periode	: RPD Tahun 2024-2026

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI						
1	LHE SAKIP 2024	1. Desk penyusunan perencanaan kinerja, 2. Aplikasi RPD 2024-2026, e-RPJMD, dan e-Renstra, 3. Penyusunan pohon kinerja seluruh level perangkat daerah dengan berdasarkan permasalahan dan isu strategis	KE	1	1. Pengembangan aplikasi perencanaan terintegrasi dengan mempertimbangkan penyusunan CSF, 2. Desk Penyusunan perencanaan kinerja level strategis sampai operasional (pohon kondisi, pohon kinerja, cascading, indikator kinerja)	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
2	LHE SAKIP 2024	1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja oleh seluruh Perangkat Daerah dan Pemda, 2. Melakukan penilaian akuntabilitas kinerja seluruh Perangkat Daerah, 3. Melakukan pemaparan persiapan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja seluruh Perangkat daerah setiap tahunnya	KE	1	Menyusun pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
3	LHE SAKIP 2024	1. Melakukan evaluasi Internal terhadap implementasi SAKIP pada seluruh perangkat daerah, 2. Melakukan Rapat Koordinasi Tim SAKIP, 3. Melakukan pemaparan persiapan evaluasi SAKIP oleh seluruh kepala Perangkat Daerah	KE	1	Menyusun SE tindaklanjut/perbaikan hasil evaluasi internal kepada seluruh perangkat daerah, Melakukan monev kinerja secara intensif kepada seluruh perangkat daerah	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
4	LHPK SPIP 2024	1. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, 2. Desk reviu cascading, 3. Desk retargeting kinerja, 4. Monitoring evaluasi kinerja secara berkala	KE	1	1. Pendampingan penyusunan Renstra/ Dokumen perencanaan perangkat daerah, 2. Melakukan desk reviu cascading perangkat daerah	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
5	LHPK SPIP 2024	1. Sosialisasi Manajemen Risiko, 2. Bimbingan Teknis SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko, 3. Pendampingan penyusunan dokumen RTP dan evaluasi RTP Perangkat Daerah, 4. Entry Meeting SPIP	KE	1	1. Bimtek SPIP dan MRI, 2. Pendampingan penyusunan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT						
6	LHE SAKIP 2024	1. Penyusunan laporan PK seluruh perangkat daerah dan Kepala Daerah, 2. Desk reviu indikator kinerja dan keselarasan kinerja, 3. Melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan rencana aksi seluruh perangkat daerah, 4. Monev kinerja kepada seluruh perangkat daerah	KE	1	Pengembangan aplikasi manajemen kinerja	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

Sumber: Aplikasi MRI 2025

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan

Kolom d diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian yang ada:

- (1) E apabila Efektif;
- (2) KE apabila Kurang Efektif;
- (3) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

FORMULIR KERTAS KERJA

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode Yang dinilai	: Periode RPD Tahun 2024-2026		
Sumber Data	: RPD 2024-2026		
Tujuan Strategis RPD	Tujuan 1	Memperkuat Ketahanan Pangan	
	Tujuan 2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM	
	Tujuan 3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	
	Tujuan 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing	

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Konsumsi pangan belum ideal	RSP.25..01.00	1. Surat Edaran Bupati Nomor : 500.1 /2705 Tahun 2024 tentang Gerakan Selamatkan Pangan, 2. SK Bupati Nomor 641 Tahun 2024 tentang Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Kabupaten Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penyusunan Kebijakan Penganekaragaman Pangan (Perbup 2025), 2. SE Pemotongan Hewan Kurban yang aman, 3. Perubahan Kebijakan CPPD 2025	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
2	Nilai tambah produk unggulan sektor pertanian tidak meningkat	RSP.25..01.00	1. Kajian Produk Unggulan Daerah tahun 2024; 2. SK penetapan komoditas unggulan daerah tahun 2005	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	1. Penyusunan kebijakan Penetapan produk unggulan daerah; 2. Penyusunan kebijakan penetapan kawasan pengembangan produk unggulan daerah.	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
3	Kontribusi pariwisata terhadap PAD masih rendah	RSP.25..01.00	1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata; 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Banyumas;	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan dan penetapan Riparkab (rencana induk pariwisata kabupaten)	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
			3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu Pada Kawasan Wisata; 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Tarif Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu Pada Kawasan Wisata					
4	Kurangnya daya saing usaha mikro	RSP.25..01.00	1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Digitalisasi; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas; 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan (SK Bupati) terkait inkubator bisnis	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
5	Ekonomi Kreatif tidak berkembang	RSP.25..01.00	1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Komite Ekonomi Kreatif; 2. Perda Banyumas Nomor 5 tahun 2021 tentang pengembangan ekonomi kreatif	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Perbup terkait Rencana pengembangan ekonomi kreatif	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
6	Rendahnya minat investor yang berinvestasi	RSP.25..01.00	1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Banyumas; 2. Perbup Banyumas nomor 43 tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik; 3. Laporan Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Draf Perda/Perbup RUPMK (Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten) tahun 2026-2045	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
7	Peningkatan jumlah kelahiran penduduk yang tinggi	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan lanjutan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK); 2. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Banyumas; 3. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan anak; 4. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Bupati terkait dengan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK); 2. Menjalin kerjasama lingkup Kabupaten dengan stakeholder lain terkait pencegahan pernikahan anak; 3. Sinkronisasi kebijakan kampung KB dengan kebijakan perlindungan anak 	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
8	Urbanisasi penduduk (desa ke kota) tinggi	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan peraturan menteri RTRW Kab. Banyumas tahun 2023-2043; 2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan: Banyumas, Purwokerto, dan Sokaraja 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan menteri RTRW Kab. Banyumas tahun 2023-2043; 2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan: Wangon, Ajibarang (2025), Sumpiuh (2026); 3. Review RDTR Kawasan Perkotaan purwokerto (2025) 	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
9	Belum semua masyarakat miskin terintervensi bantuan	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; 3. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin; 4. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 Melalui Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Tahap Kesatu; 5. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas; 6. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2024 Tentang Tim Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Banyumas Tahun 2024; 7. SK Lokasi Prioritas Kemiskinan Ekstrem (2023-2024) 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Bupati Penetapan penerima bantuan sosial (RLH); 2. SK penetapan Lokasi Prioritas Kemiskinan Ekstrem (2025) 	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
10	Masyarakat miskin tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pendapatan	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro; 2. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 tahun 2009 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas; 3. Peraturan Bupati Banyumas No 16 tahun 2022 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Digitalisasi; 4. 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Peraturan Bupati Banyumas (Perbup) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
			Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas					
11	Masih adanya masyarakat yang belum terlayani pelayanan kesehatan dasar	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas; 2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 602 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2028; 3. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 4. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1066 Tahun 2024 Tentang Penetapan Target Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perbup Banyumas terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Tahun 2025); 2. Penyusunan Perbup pedoman implementasi integrasi layanan primer (ILP) (2025); 3. Penyusunan SK Target Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dan untuk 2026 	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
12	Warga Usia Sekolah Tidak Bersekolah	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Banyumas; 2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/048/tahun 2022 Tentang Tim Koordinasi Dan Kelompok Kerja Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Banyumas; 3. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar; 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Bantuan Pembiayaan Pendidikan Keagamaan Nonformal Di Kabupaten Banyumas; 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Inklusif. 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan SE Bupati terkait tindaklanjut SPM Pendidikan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
13	Layanan pendidikan belum sesuai standar	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Banyumas; 2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/048/tahun 2022 Tentang Tim Koordinasi Dan Kelompok Kerja Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Banyumas; 3. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar; 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Bantuan Pembiayaan Pendidikan Keagamaan Nonformal Di Kabupaten Banyumas; 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Inklusif. 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan SE Bupati terkait tindaklanjut SPM Pendidikan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
14	Kualitas riset daerah masih rendah	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Banyumas Nomor 4 tahun 2024 tentang riset dan inovasi daerah; 2. SK Bupati Banyumas Nomor 070/727 tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan bupati banyumas nomor 050 - 180 - Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi dan satuan bersama sistem pengembangan kreativitas dan inovasi Kab Banyumas 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Forum Komunikasi Riset dan Inovasi di Kabupaten Banyumas; 2. Penetapan Perbup RIPJPID Kabupaten Banyumas 	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
15	Penurunan kualitas lingkungan hidup dan ancaman perubahan iklim	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri; 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah; 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Program Kampung Iklim Di Kabupaten Banyumas; 6. MoU Pengembangan hasil pengolahan sampah di Kab. Banyumas untuk mendukung transisi energi dan pencapaian target net zero emission dengan PT. Sinar Energi Utama dan PT. PLN Energi Primer Indonesia; 7. MoU Pemanfaatan meterial hasil pemilahan sampah Kab. Banyumas untuk bahan bakar alternatif di pabrik semen milik PT. Solusi Bangun Indonesia; 8. Perbup Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan plastik dan steroform; 9. Perbup 45 Tahun 2018 : Kebijakan Strategis Daerah Kabupaten Banyumas tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; 10. Perbup 54 Tahun 2018 : Pedoman Umum Tugas Pembantuan dalam Pengelolaan Sampah Rumah tangga Kepada Desa dalam Wilayah Kabupaten Banyumas; 11. Perbup 24 Tahun 2023 : Pelaksanaan Pengelolaan Sampah; 12. Kajian Evaluasi Persampahan; 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan Rencana Induk Persampahan (2025)	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
			13. Perbup 45 Tahun 2018 tentang Jakstrada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga					
16	Kurangnya ketahanan daerah terhadap bencana	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas; 2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/136/2023 tentang Kajian Risiko Bencana Kab. Banyumas Tahun 2023-2027; 3. Mou Bupati Banyumas dengan Korea Smart City terkait EWS Tahun 2024 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen Rencana Kontijensi untuk Tanah Longsor, Banjir, Gunung api Slamet dan Gempa Bumi; 2. Penyusunan Kebijakan pembentukan Forum PRB; 3. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan EWS; 4. Review Kebijakan Kajian Risiko Bencana (Perbup) 	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
17	Masih banyaknya angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Digitalisasi; 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penyaluran Penguatan Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyumas; 4. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 155 Tahun 2024 Tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemanfaatan, Pemberdayaan, Dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan untuk arah kedepan berkaitan dengan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; 2. Peningkatan keterampilan soft skills seperti komunikasi, kerja sama tim, dan problem-solving; 3. Membangun kemitraan antara institusi pendidikan dan industri untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. 	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
18	Masih adanya desa rawan pangan	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Bupati Nomor 500/205 tahun 2023 tentang tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Banyumas; 2. SK Bupati Penetapan Peta FSVA (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) 2024; 3. SE Bupati Nomor 530/7400/2023 tentang Gerakan belanja di warung Tetangga untuk ASN; 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peta kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA) Kabupaten Banyumas tahun 2025; 2. Penetapan Revisi SK Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Banyumas (2025) 	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
			4. SE Bupati Nomor 500.1.1/870/2024 tentang Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dan Desa untuk mendukung Pengendalian Inflasi Harga Pangan					
19	Penurunan Daya dukung pangan	RSP.25..01.00	<p>1. Surat Pesanan dengan BULOG untuk penyimpanan cadangan pangan pemerintah daerah (mengurangi kerusakan beras) nomor 236/000.3/SP-KP/2024;</p> <p>2. Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 520/6937/2023 tentang gerakan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengendalian inflasi dan ketahanan pangan rumah tangga;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketahanan pangan;</p> <p>4. Keputusan Bupati Banyumas No 521/196/Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Banyumas;</p> <p>5. SE Bupati Nomor 500.1.1/870/2024 tentang Penguatan Ketahanan Pangan Daerah dan Desa untuk mendukung Pengendalian Inflasi Harga Pangan</p>	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	<p>1. Penetapan Perda Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;</p> <p>2. Penyusunan kebijakan terkait pengelolaan cadangan pangan (2025-2026);</p> <p>3. Review Kebijakan terkait kawasan minapolitan (2025)</p> <p>4. SK Penetapan Wilayah Sumber Bibit kambing Perah (dikaitkan dg Kambing Etawa sebagai Produk Unggulan Daerah)</p>	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
20	kesenjangan tingkat pendidikan antar gender masih tinggi	RSP.25..01.00	<p>1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Banyumas;</p> <p>2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 411.4/264/2011 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas;</p> <p>3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas Tahun 2009-2013</p>	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penetapan kebijakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan gender Kabupaten Banyumas	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
21	Belum terpenuhinya hak-hak anak dalam keluarga	RSP.25..01.00	1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 460/142/ Tahun 2021 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021; 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Sinkronisasi kebijakan kampung KB dengan kebijakan perlindungan anak	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
22	Implementasi kebijakan KLA dalam pemenuhan hak perlindungan khusus bagi anak berhadapan hukum di Kabupaten Banyumas belum optimal	RSP.25..01.00	1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 460/142/ Tahun 2021 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2021; 3. Perbup SOTK UPT PPT-PKBGA	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan RAD Kota layak anak	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
23	Pemanfaatan transportasi umum belum optimal	RSP.25..01.00	1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 44 Tahun 2021 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melewati Trayek Di Kabupaten Banyumas;	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan (bappeda); 2. kajian evaluasi MRLL (manajemen Rekayasa Lalu Lintas) Kawasan Perkotaan Purwokerto	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
24	Pemanfaatan layanan Instalasi Pengolahan lumpur tinja (IPLT) belum optimal	RSP.25..01.00	1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah; 2. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. penyusunan RISPALD (Rencana Induk sistem pengelolaan air limbah domestik) (2025); 2. Penetapan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) (2025); 3. SK bupati terkait L2T2 (Layanan Lumpur tinja terjadwal) (2025)	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
25	Menurunnya fungsi infrastruktur jaringan jalan dan irigasi	RSP.25..01.00	1. SK Bupati terkait Penetapan ruas Jalan kabupaten; 2. Perda terkait Irigasi	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penyusunan/ penetapan Kebijakan prioritas pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan irigasi (berdasarkan hasil KUAPPAS);	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
						2. Penyusunan Perda tentang jasa Konstruksi		
26	Kurang berkembangnya potensi pemuda	RSP.25..01.00	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kepemudaan Dan Keolahragaan;	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penyusunan kebijakan Peta Jalan Desain Olahraga Daerah (DOD); 2. Penyusunan / penetapan RAD pelayanan kepemudaan (2025).	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
27	Kurangnya pemanfaatan perpustakaan	RSP.25..01.00	Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 84 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dearah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Peningkatan kerjasama perpustakaan daerah dengan Perguruan Tinggi, Sekolah/desa/LSM lainnya; 2. Penyusunan PerBup tentang tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan untuk masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno atau yang menyerahkan naskah kuno kepada Perangkat Daerah (belum ada dasar untuk melakukan penulurusan naskah kuno); 3. Penyusunan Perbup Tentang Kewajiban Akreditasi Perpustakaan di Kabupaten Banyumas.	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
28	Adanya Aduan berulang terhadap pelayanan publik di Kabupaten Banyumas	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup No 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; 2. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Hubungan Kerja Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas; 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik; 4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Banyumas; 5. Perbup Banyumas Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pelayanan Administrasi kependudukan secara online; 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Penetapan SK Tim evaluator dan administrasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik mandiri di lingkungan Pemkab Banyumas 	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
29	Adanya kesenjangan kompetensi ASN	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup nomor 76 Tahun 2022 tentang pola karir PNS Kabupaten Banyumas, 2. Perbup no 11 tahun 2023 tentang manajemen talenta ASN di lingkungan Pemkab Banyumas 3. SK Bupati No. 800/615 Tahun 2022 tentang Tim Penilai Sistem Merit di lingkungan pemerintah kab. banyumas; 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; 6. Keputusan Bupati Nomor 060/735/2022 tentang Tim penyusun standar kompetensi jabatan ASN di Lingkungan pemerintah Kab Banyumas; 7. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2023 tentang pengembangan kompetensi ASN melalui Corporate University; 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan peraturan bupati tentang pengembangan kompetensi ASN secara menyeluruh; 2. Penetapan Revisi Perbup Pola Karir ASN Kab. Banyumas 	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
			8. Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 840/2424/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Negeri Sipil Negara (ASN) Dan Pegawai Non Aparatur Negeri Sipil Negara (Non ASN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;					
30	Perencanaan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja organisasi yang menjadi dasar penentuan reward	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengelolaan risiko; 2. Perbup Nomor 47 Tahun 2018 tentang SAKIP; 3. Sistem Informasi Jegos untuk mengukur capaian kinerja fisik dan keuangan; 4. Sistem informasi e-Monev untuk mengukur capaian indikator kinerja; 5. Sistem Informasi e-SAKIP untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 6. Penyusunan konsep sistem informasi manajemen kinerja; 7. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 40 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 060/140/ Tahun 2021 Tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan penerapan Manajemen kinerja terintegrasi melalui sistem informasi manajemen kinerja	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
31	Pengendalian intern penyelenggaraan pemerintahan belum efektif mendorong pencapaian tujuan Pemkab	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Intern Atas Kualitas Pengawasan Intern Pada Inspektorat Daerah; 3. Perbup Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Risiko di Kabupaten Banyumas; 4. SK Bupati Banyumas tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas; 5. Surat Edaran NOMOR 000.6.5.1/19/2024 TAHUN 2024 Tentang Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko di Lingkungan Perangkat Daerah Kab. Banyumas. 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan tematik pengendalian intern sesuai tujuan Pemkab; 2. Evaluasi perbup Nomor 12 tahun 2021 tentang pengelolaan risiko 3. Penyusunan revisi Perbup Nomor 12 tahun 2021 tentang pengelolaan risiko (metode heatmap); 4. SE Bupati Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan pemkab Banyumas; 5. SK Bupati tentang PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan 2025); 6. Surat Edaran terkait sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko di lingkungan perangkat daerah kabupaten Banyumas Tahun 2025 	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
32	Penyelenggaraan pemerintah belum sepenuhnya terintegrasi, tersistematis dan terpadu dalam memanfaatkan TIK	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Banyumas Nomor 37 Tahun 2023 tentang SPBE di Lingkungan Pemkab Banyumas; 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan pemerintah Kab Banyumas; 3. Keputusan Bupati Nomor 060/544/tahun 2022 Tentang Tim Koordinasi Dan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; 5. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 046/311/ Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik; 6. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Perangkat Lunak Di Kabupaten Banyumas; 7. Keputusan Bupati Nomor 642 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Banyumas; 8. Keputusan Bupati Nomor 647 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Banyumas; 9. Keputusan Bupati Nomor 644 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Banyumas; 10. Keputusan Bupati Nomor 587 Tahun 2024 tentang Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Banyumas; 11. Surat Edaran Nomor 000.8/3572/Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE Kabupaten Banyumas; 12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satu Data. 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Revisi dan Perubahan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Perangkat Lunak Di Kabupaten Banyumas;	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangun g Jawab	Target Waktu Penyelesaia n
a	b	c	d	e	f	g	h	i
33	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah untuk pelaksanaan pembangunan	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Banyumas Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, 2. Perbup Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas; 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Perbup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
34	Masih lemahnya tingkat kemandirian fiskal daerah	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak Dan/atau Sanksi Pajak Dan Retribusi 3. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 223 tahun 2024 tentang perhitungan besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terhutang Kabupaten banyumas Tahun 2024 4. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 1016 tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Pembebasan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terhutang tahun 1994 sd tahun 2023 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan 6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan/atau Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Terhutang Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 2022 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah; 9. SK Bupati Banyumas Nomor 181 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati amanat peraturan daerah Kab. Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi daerah 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RAD Peningkatan Pendapatan Daerah; 2. Perbup terkait tata cara pengutan retribusi jasa usaha pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyeleggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau Optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Perbup terkait tata cara pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; 4. Perbup terkait tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan; 5. Perbup terkait tata cara pemungutan pajak air tanah; 6. Perbup terkait tata cara pemeriksaan pajak daerah; 7. Perbup terkait klasifikasi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; 8. Perbup terkait tata cara pemungutan Opsen MBLB 	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
35	Terjadinya gangguan tantribum	RSP.25..01.00	1 Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/540/tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyumas; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan; 3.3 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten banyumas Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; 2. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Banyumas; 3. Perubahan perda 11 Tahun 2019 tentang penanganan konflik; 4. Penyusunan Perbup tentang pusat pendidikan wawasan kebangsaan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
36	Masih banyaknya angkatan kerja dengan pendidikan rendah	RSP.25..01.00	1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kerja Dan Pelayanan Produktivitas; 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 mengatur tentang pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Penyusunan kebijakan pemetaan rencana pelatihan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan dunia industri; 2. Meningkatkan hubungan kerjasama (MoU) antara pemerintah daerah dengan tenaga ahli pelatihan kerja; 3. Penyusunan kebijakan terkait akreditasi lembaga pelatihan yang berkualitas	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
37	Perencanaan dan pengendalian yang diterapkan belum berbasis risiko	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengelolaan risiko; 2. Perbup Nomor 49 Tahun 2023 tentang Maturitas SPIP Terintegrasi Kabupaten Banyumas; 3. Perbup No 47 Tahun 2018 tentang SAKIP; 4. Sistem Informasi Jegos untuk mengukur capaian kinerja fisik dan keuangan; 5. Sistem informasi e-Monev untuk mengukur capaian indikator kinerja; 6. Sistem Informasi e-SAKIP untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 7. Surat Edaran Sekda tentang Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja dan LKJIP; 8. Penyediaan Sistem Informasi Perencanaan terintegrasi; 9. Penyediaan Sistem Informasi e-MRI untuk pengelolaan risiko; 10. Penyediaan Sistem Informasi e-SPIP untuk pengendalian intern pemerintah daerah 	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Penyusunan kebijakan perencanaan berbasis risiko	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
38	Masih tingginya persepsi korupsi	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 tahun 2021 tentang Pedoman pengendalian gratifikasi; 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman umum sistem penanganan pengaduan (whistleblower system) tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah kab. banyumas; 3. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) tindak Pidana Korupsi 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sistem pengawasan dan penguatan budaya anti korupsi di lingkungan Kabupaten Banyumas	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
39	Kinerja individu dan OPD belum mendukung Tujuan Reformasi Birokrasi Pemkab	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup nomor 68 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi pada Pemkab Banyumas Tahun 2023-2024; 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan penerapan RB Tematik; 2. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten Banyumas 	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
40	Kinerja ASN belum sepenuhnya mendukung kinerja organisasi	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup nomor 76 Tahun 2022 tentang pola karir PNS Kabupaten Banyumas, 2. Perbup no 11 tahun 2023 tentang manajemen talenta ASN di lingkungan Pemkab Banyumas 3. SK Bupati No. 800/615 Tahun 2022 tentang Tim Penilai Sistem Merit di lingkungan pemerintah kab. banyumas; 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; 5. SE Sekretaris Daerah Nomor : 800.1/4819/X/2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Peer Review dan Vote Pegawai terbaik pada Pemerintah Kabupaten Banyumas 	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. SE Penyusunan Kebijakan penggunaan sistem informasi manajemen kinerja ASN yang terintegrasi (Setda 2025) 2. SE Sekda tentang pedoman coaching dan mentoring. 	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026
41	Masih rendahnya tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	RSP.25..01.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Kerja) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024; 2. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 70 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023; 3. Sosialisasi penilaian mandiri indeks reformasi hukum (IRH) pada pemerintah daerah di wilayah Jawa Tengah Tahun 2024; 4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; 6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 7237 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati Di Kabupaten Banyumas; 7. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 123 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyumas; 	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan kebijakan bupati banyumas tentang tim analisis dan evaluasi produk hukum daerah	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
			8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 180/071/tahun 2022 Tentang Tim Pembina Dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Banyumas					
42	kurangnya standar pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan	RSP.25..01.00	1. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024; 2. Perbup Banyumas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas; 3. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 4. Perbup Banyumas Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	KE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Penghapusan perda perencanaan penganggaran terpadu	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026

Sumber: Aplikasi MRI 2025

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang.

Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:

(1) E apabila Efektif;

(2) KE apabila Kurang Efektif;

(3) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom f Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom g diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom h diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom i diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH, web Pemerintah Kabupaten Banyumas) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Rapat/koordinasi/konsultasi/bimtek;
4. Surat Tugas atau Surat Keputusan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran form 8.

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode Yang dinilai	: Periode RPD Tahun 2024-2026	
Sumber Data	: RPD 2024-2026	
Tujuan Strategis RPD	Tujuan 1	Memperkuat Ketahanan Pangan
	Tujuan 2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM
	Tujuan 3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
	Tujuan 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	1. Penyusunan Kebijakan Penganekaragaman Pangan (Perbup 2025), 2. SE Pemotongan Hewan Kurban yang aman, 3. Perubahan Kebijakan CPPD 2025	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
2	1. Penyusunan kebijakan Penetapan produk unggulan daerah; 2. Penyusunan kebijakan penetapan kawasan pengembangan produk unggulan daerah.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
3	Penyusunan dan penetapan Riparkab (rencana induk pariwisata kabupaten)	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
4	Penyusunan kebijakan (SK Bupati) terkait inkubator bisnis	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
5	Penyusunan Perbup terkait Rencana pengembangan ekonomi kreatif	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
6	Penyusunan Draf Perda/Perbup RUPMK (Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten) tahun 2026-2045	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
7	1. Penetapan Peraturan Bupati terkait dengan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK); 2. Menjalin kerjasama lingkup Kabupaten dengan stakeholder lain terkait pencegahan pernikahan anak; 3. Sinkronisasi kebijakan kampung KB dengan kebijakan perlindungan anak	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
8	1. Penetapan peraturan menteri RTRW Kab. Banyumas tahun 2023-2043; 2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan: Wangon, Ajibarang (2025), Sumpiuh (2026); 3. Review RDTR Kawasan Perkotaan purwokerto (2025)	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
9	1. SK Bupati Penetapan penerima bantuan sosial (RLH); 2. SK penetapan Lokasi Prioritas Kemiskinan Ekstrem (2025)	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
10	Penyusunan Peraturan Bupati Banyumas (Perbup) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
11	1. Penyusunan Perbup Banyumas terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Tahun 2025); 2. Penyusunan Perbup pedoman implementasi integrasi layanan primer (ILP) (2025); 3. Penyusunan SK Target Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dan untuk 2026	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
12	Penyusunan SE Bupati terkait tindaklanjut SPM Pendidikan	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
13	Penyusunan SE Bupati terkait tindak lanjut SPM Pendidikan	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
14	1. Pembentukan Tim Forum Komunikasi Riset dan Inovasi di Kabupaten Banyumas; 2. Penetapan Perbup RIPJPID Kabupaten Banyumas	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
15	Penyusunan Rencana Induk Persampahan (2025)	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
16	1. Penyusunan dokumen Rencana Kontijensi untuk Tanah Longsor, Banjir, Gunung api Slamet dan Gempa Bumi; 2. Penyusunan Kebijakan pembentukan Forum PRB; 3. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan EWS; 4. Review Kebijakan Kajian Risiko Bencana (Perbup)	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
17	1. Kebijakan untuk arah kedepan berkaitan dengan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 2. Peningkatan keterampilan soft skills seperti komunikasi, kerja sama tim, dan problem-solving. 3. Membangun kemitraan antara institusi pendidikan dan industri untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
18	1. Penetapan Peta kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA) Kabupaten Banyumas tahun 2025 2. Penetapan Revisi SK Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Banyumas (2025)	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
19	1. Penetapan Perda Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; 2. Penyusunan kebijakan terkait pengelolaan cadangan pangan (2025-2026); 3. Review Kebijakan terkait kawasan minapolitan (2025) 4. SK Penetapan Wilayah Sumber Bibit kambing Perah (dikaitkan dg Kambing Etawa sebagai Produk Unggulan Daerah)	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
20	Penetapan kebijakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan gender Kabupaten Banyumas	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
21	Sinkronisasi kebijakan kampung KB dengan kebijakan perlindungan anak	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
22	Penyusunan RAD Kota layak anak	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
23	1. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan (bappeda); 2. kajian evaluasi MRL (manajemen Rekayasa Lalu Lintas) Kawasan Perkotaan Purwokerto	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
24	1. penyusunan RISPALD (Rencana Induk sistem pengelolaan air limbah domestik) (2025); 2. Penetapan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) (2025); 3. SK bupati terkait L2T2 (Layanan Lumpur tinja terjadwal) (2025)	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
25	1. Penyusunan/ penetapan Kebijakan prioritas pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan irigasi (berdasarkan hasil KUAPPAS); 2. Penyusunan Perda tentang jasa Konstruksi	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
26	1. Penyusunan kebijakan Peta Jalan Desain Olahraga Daerah (DOD); 2. Penyusunan / penetapan RAD pelayanan kepemudaan (2025).	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
27	1. Peningkatan kerjasama perpustakaan daerah dengan Perguruan Tinggi, Sekolah/desa/LSM lainnya; 2. Penyusunan PerBup tentang tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan untuk masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno atau yang menyerahkan naskah kuno kepada Perangkat Daerah (belum ada dasar untuk melakukan penulisan naskah kuno); 3. Penyusunan Perbup Tentang Kewajiban Akreditasi Perpustakaan di Kabupaten Banyumas.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
28	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Penetapan SK Tim evaluator dan administrasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik mandiri di lingkungan Pemkab Banyumas	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
29	1. Penyusunan kebijakan peraturan bupati tentang pengembangan kompetensi ASN secara menyeluruh; 2. Penetapan Revisi Perbup Pola Karir ASN Kab. Banyumas	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
30	Penyusunan kebijakan penerapan Manajemen kinerja terintegrasi melalui sistem informasi manajemen kinerja	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
31	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan tematik pengendalian intern sesuai tujuan Pemkab; 2. Evaluasi perpup Nomor 12 tahun 2021 tentang pengelolaan risiko 3. Penyusunan revisi Perpup Nomor 12 tahun 2021 tentang pengelolaan risiko (metode heatmap); 4. SE Bupati Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Pemkab Banyumas; 5. SK Bupati tentang PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan 2025); 6. Surat Edaran terkait sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko di lingkungan perangkat daerah kabupaten Banyumas Tahun 2025 	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
32	Revisi dan Perubahan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Perangkat Lunak Di Kabupaten Banyumas;	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
33	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Perbup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
34	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RAD Peningkatan Pendapatan Daerah; 2. Perbup terkait tata cara pengutan retribusi jasa usaha pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelesaian tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau Optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Perbup terkait tata cara pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; 4. Perbup terkait tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan; 5. Perbup terkait tata cara pemungutan pajak air tanah; 6. Perbup terkait tata cara pemeriksaan pajak daerah; 7. Perbup terkait klasifikasi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; 8. Perbup terkait tata cara pemungutan Opsen MBLB 	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten banyumas Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; 2. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Banyumas; 3. Perubahan perda 11 Tahun 2019 tentang penanganan konflik; 4. Penyusunan Perbup tentang pusat pendidikan wawasan kebangsaan 	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
36	1. Penyusunan kebijakan pemetaan rencana pelatihan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan dunia industri; 2. Meningkatkan hubungan kerjasama (MoU) antara pemerintah daerah dengan tenaga ahli pelatihan kerja; 3. Penyusunan kebijakan terkait akreditasi lembaga pelatihan yang berkualitas	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
37	Penyusunan kebijakan perencanaan berbasis risiko	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
38	Meningkatkan sistem pengawasan dan penguatan budaya anti korupsi di lingkungan Kabupaten Banyumas	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
39	1. Penyusunan Kebijakan penerapan RB Tematik; 2. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten Banyumas	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
40	1. SE Penyusunan Kebijakan penggunaan sistem informasi manajemen kinerja ASN yang terintegrasi (Setda 2025); 2. SE Sekda tentang pedoman coaching dan mentoring.	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
41	Penyusunan kebijakan bupati banyumas tentang tim analisis dan evaluasi produk hukum daerah	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		
42	Penghapusan perda perencanaan penganggaran terpadu	Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Surat Tugas/SK Tim, Website	Bupati Banyumas	Seluruh OPD, Stakeholder terkait	Tahun 2024-2026		

Sumber: Aplikasi MRI 2025

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran form 9.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran form 10.

RANCANGAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode Yang dinilai	: Periode RPD Tahun 2024-2026		
Sumber Data	: RPD 2024-2026		
Tujuan Strategis RPD	Tujuan 1	Memperkuat Ketahanan Pangan	
	Tujuan 2	Menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas SDM	
	Tujuan 3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	
	Tujuan 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih Efektif dan Berdaya Saing	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	1. Penyusunan Kebijakan Penganekaragaman Pangan (Perbup 2025), 2. SE Pematangan Hewan Kurban yang aman, 3. Perubahan Kebijakan CPPD 2025	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
2	1. Penyusunan kebijakan Penetapan produk unggulan daerah; 2. Penyusunan kebijakan penetapan kawasan pengembangan produk unggulan daerah.	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
3	Penyusunan dan penetapan Riparkab (rencana induk pariwisata kabupaten)	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
4	Penyusunan kebijakan (SK Bupati) terkait inkubator bisnis	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
5	Penyusunan Perbup terkait Rencana pengembangan ekonomi kreatif	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
6	Penyusunan Draf Perda/Perbup RUPMK (Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten) tahun 2026-2045	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
7	1. Penetapan Peraturan Bupati terkait dengan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK); 2. Menjalin kerjasama lingkup Kabupaten dengan stakeholder lain terkait pencegahan pernikahan anak; 3. Sinkronisasi kebijakan kampung KB dengan kebijakan perlindungan anak	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
8	1. Penetapan peraturan menteri RTRW Kab. Banyumas tahun 2023-2043; 2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan: Wangon, Ajibarang (2025), Sumpiuh (2026); 3. Review RDTR Kawasan Perkotaan purwokerto (2025)	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
9	1. SK Bupati Penetapan penerima bantuan sosial (RLH); 2. SK penetapan Lokasi Prioritas Kemiskinan Ekstrem (2025)	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
10	Penyusunan Peraturan Bupati Banyumas (Perbup) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
11	1. Penyusunan Perbup Banyumas terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Tahun 2025); 2. Penyusunan Perbup pedoman implementasi integrasi layanan primer (ILP) (2025); 3. Penyusunan SK Target Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dan untuk 2026	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
12	Penyusunan SE Bupati terkait tindaklanjut SPM Pendidikan	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
13	Penyusunan SE Bupati terkait tindaklanjut SPM Pendidikan	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
14	1. Pembentukan Tim Forum Komunikasi Riset dan Inovasi di Kabupaten Banyumas; 2. Penetapan Perbup RIPJPID Kabupaten Banyumas	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
15	Penyusunan Rencana Induk Persampahan (2025)	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
16	1. Penyusunan dokumen Rencana Kontijensi untuk Tanah Longsor, Banjir, Gunung api Slamet dan Gempa Bumi; 2. Penyusunan Kebijakan pembentukan Forum PRB; 3. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan EWS; 4. Review Kebijakan Kajian Risiko Bencana (Perbup)	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
17	1. Kebijakan untuk arah kedepan berkaitan dengan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 2. Peningkatan keterampilan soft skills seperti komunikasi, kerja sama tim, dan problem-solving. 3. Membangun kemitraan antara institusi pendidikan dan industri untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja.	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
18	1. Penetapan Peta kerentanan dan ketahanan pangan (FSVA) Kabupaten Banyumas tahun 2025; 2. Penetapan Revisi SK Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Banyumas (2025)	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
19	1. Penetapan Perda Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; 2. Penyusunan kebijakan terkait pengelolaan cadangan pangan (2025-2026); 3. Review Kebijakan terkait kawasan minapolitan (2025); 4. SK Penetapan Wilayah Sumber Bibit kambing Perah (dikaitkan dg Kambing Etawa sebagai Produk Unggulan Daerah)	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
20	Penetapan kebijakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan gender Kabupaten Banyumas	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
21	Sinkronisasi kebijakan kampung KB dengan kebijakan perlindungan anak	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
22	Penyusunan RAD Kota layak anak	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
23	1. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan (bappeda); 2. kajian evaluasi MRL (manajemen Rekayasa Lalu Lintas) Kawasan Perkotaan Purwokerto	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
24	1. penyusunan RISPALD (Rencana Induk sistem pengelolaan air limbah domestik) (2025); 2. Penetapan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) (2025); 3. SK bupati terkait L2T2 (Layanan Lumpur tinja terjadwal) (2025)	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
25	1. Penyusunan/ penetapan Kebijakan prioritas pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan irigasi (berdasarkan hasil KUAPPAS); 2. Penyusunan Perda tentang jasa Konstruksi	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
26	1. Penyusunan kebijakan Peta Jalan Desain Olahraga Daerah (DOD);	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	2. Penyusunan / penetapan RAD pelayanan kepemudaan (2025).					
27	1. Peningkatan kerjasama perpustakaan daerah dengan Perguruan Tinggi, Sekolah/desa/LSM lainnya; 2. Penyusunan PerBup tentang tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan untuk masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno atau yang menyerahkan naskah kuno kepada Perangkat Daerah (belum ada dasar untuk melakukan penulusuran naskah kuno); 3. Penyusunan Perbup Tentang Kewajiban Akreditasi Perpustakaan di Kabupaten Banyumas.	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
28	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik; 2. Penetapan SK Tim evaluator dan administrasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik mandiri di lingkungan Pemkab Banyumas	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
29	1. Penyusunan kebijakan peraturan bupati tentang pengembangan kompetensi ASN secara menyeluruh; 2. Penetapan Revisi Perbup Pola Karir ASN Kab. Banyumas	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
30	Penyusunan kebijakan penerapan Manajemen kinerja terintegrasi melalui sistem informasi manajemen kinerja	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
31	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan tematik pengendalian intern sesuai tujuan Pemkab; 2. Evaluasi perbup Nomor 12 tahun 2021 tentang pengelolaan risiko; 3. Penyusunan revisi Perbup Nomor 12 tahun 2021 tentang pengelolaan risiko (metode heatmap); 4. SE Bupati Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Pemkab Banyumas; 5. SK Bupati tentang PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan 2025); 6. Surat Edaran terkait sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko di lingkungan perangkat daerah kabupaten Banyumas Tahun 2025 	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
32	Revisi dan Perubahan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Perangkat Lunak Di Kabupaten Banyumas;	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
33	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Perbup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
34	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RAD Peningkatan Pendapatan Daerah; 2. Perbup terkait tata cara pengutan retribusi jasa usaha pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyeleggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/ atau Optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Perbup terkait tata cara pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; 4. Perbup terkait tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan; 5. Perbup terkait tata cara pemungutan pajak air tanah; 6. Perbup terkait tata cara pemeriksaan pajak daerah; 7. Perbup terkait klasifikasi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; 8. Perbup terkait tata cara pemungutan Opsen MBLB 	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten banyumas Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; 2. Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Banyumas; 3. Perubahan perda 11 Tahun 2019 tentang penanganan konflik; 4. Penyusunan Perbup tentang pusat pendidikan wawasan kebangsaan 	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
36	1. Penyusunan kebijakan pemetaan rencana pelatihan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan dunia industri; 2. Meningkatkan hubungan kerjasama (MoU) antara pemerintah daerah dengan tenaga ahli pelatihan kerja; 3. Penyusunan kebijakan terkait akreditasi lembaga pelatihan yang berkualitas	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
37	Penyusunan kebijakan perencanaan berbasis risiko	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
38	Meningkatkan sistem pengawasan dan penguatan budaya anti korupsi di lingkungan Kabupaten Banyumas	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
39	1. Penyusunan Kebijakan penerapan RB Tematik; 2. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten Banyumas	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
40	1. SE Penyusunan Kebijakan penggunaan sistem informasi manajemen kinerja ASN yang terintegrasi (Setda 2025) 2. SE Sekda tentang pedoman coaching dan mentoring.	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
41	Penyusunan kebijakan bupati banyumas tentang tim analisis dan evaluasi produk hukum daerah	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		
42	Penghapusan perda perencanaan penganggaran terpadu	Konfirmasi pelaksanaan berkelanjutan dan Laporan pelaksanaan kegiatan	Bupati Banyumas	Tahun 2024-2026		

Sumber: Aplikasi MRI 2025

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Pemerintah Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun. Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Purwokerto, Desember 2024

PJ. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR